

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK
(Studi Pembangunan Fisik Pada Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Gunan Memperoleh Gelar Sarjana Starata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DINA ANGGRAINI PUTRI

147310736

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan proposal ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis ucapkan dengan ucapan “Allahumma sholi a’la Muhammad wa’ala ali Muhammad”

Proposal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu pemerintahan pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau (UIR) dengan judul penelitian : **Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

Dalam penulisan proposal ini tidak terlepas dari dari dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si, selaku Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis proposal ini.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu pemerintahan pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL)
4. Bapak Dr. Khairul Rahman., S.sos.,M.si dan selaku pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu tenaga dan pikiran selama penyusunan proposal ini.
5. Ibuk Dita Fisdian Adni., S.IP.,M.IP selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk penulisan proposal ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada prodi Ilmu pemerintahan di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau.
7. Ayahanda dan Ibunda beserta Keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil selama ini, beserta seluruh keluarga besar Penulis.

8. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu pemerintahan pada FISIPOL Universitas Islam Riau .

Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis serta nusa dan bangsa, aamiin.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

DINA ANGGRAINI PUTRI
NPM : 147310736



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	
ABSTRAK.....	
ABSTACT.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Kegunaan penelitian.....	
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Studi Pustaka.....	
1. Ilmu Pemerintahan.....	
1.1. Pengertian pemerintahan.....	
1.2. Fungsi-Fungsi Pemerintahan.....	
1.3. Urusan pemerintahan.....	
2. Konsep Pemerintahan.....	
2.1 Konsep Pemerintahan.....	
2.2 Konsep Pemerintahan Desa.....	
2.3 Konsep Pembangunan Desa.....	
2.4 Konsep Manejemen.....	

2.5 Konsep Inovasi.....

2.6 Konsep Peranan.....

a. Stabilator.....

b. Inovator.....

c. Pelopor.....

d. Modernisator.....

e. Selaku Pelaksana Sendiri.....

2.7 Konsep Kepemimpinan Pemerintahan Desa.....

2.8 Konsep Pemerintahan Desa.....

B. PENELITIAN TERDAHULU.....

C. KERANGKA PIKIRAN.....

a. Proposisi Penelitian.....

b. Konsep Operasional.....

c. Operasional Variable.....

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....

B. Lokasi Penelitian.....

C. Informan Penelitian.....

D. Jenis Dan Sumber Data.....

E. Teknik Pengumpulan Data.....

F. Teknik Analisa Data.....

G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah ringkas desa perawang barat.....

B. Jumlah penduduk desa perawang barat.....

C. Pendidikan.....

- D. Keagamaan.....
- E. Kebudayaan masyarakat.....
- F. Ekonomi masyarakat.....
- G. Saran dan prasarana masyarakat.....

STRUKTUR ORGANISASI.....

- A. Struktur organisasi pemerintahan desa perawang barat.....
- B. Fungsi dan tugas organisasi.....
 - 1. Kepala desa.....
 - 2. Sekretaris desa.....
 - 3. Kepala urusan pemerintahan.....
 - 4. Kepala urusan pembangunan.....
 - 5. Kepala urusan umum.....
 - 6. Kepala urusan keuangan.....
 - 7. Kepala urusan kemasyarakatan desa.....
 - 8. Kepala dusun.....

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Identitas Informan.....
 - 1. Umur Informan.....
 - 2. Tingkat Pendidikan.....
- B. Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan.....
- C. Hambatan Tentang Peranan Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Perawang Barat.....

BAB VI : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Sumber Anggaran Yang Dipergunakan Membiayai Program Pembangunan Didesa Perawang Barat.....	10 45
1.2 : Penelitian terdahulu.....	46
II.1 : kerangka pemikiran pemerintah desa perawang barat.....	50
II.2 : Operasional Variable.....	57
III.1 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	60
1.3 : Pertumbuhan Penduduk desa Desa Perawang Barat.....	60
1.4 : Jumlah Penduduk.....	61
1.5 : Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	62
1.6 : Sarana Ibadah Masyarakat.....	63
1.7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	64
1.8 : Sarana Dan Prasarana Umum.....	65
V.1 : Umur Informan Berdasarkan Umur Termuda Dan Umur Tertua.....	73
V.2 : Tingkat Pendidikan Informan desa perawang barat.....	74
V.3 : Tingkat Pendidikan Informan Dari Aparat Pemerintah.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Pikiran	46
4.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Perawang Barat.....	67



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Dina Anggraini Putri
NPM : 147310736
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul UP : Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manpun juga.

Pekanbaru, 3 Desember 2021



Dina Anggraini Putri

ABSTRAK

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

(Studi Pembangunan Fisik Pada Tahun 2019)

Oleh : Dina Anggraini Putri
NPM :147310736

Tujuan Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam upaya melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya peranan masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari pembangunan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan, terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 36 informan penelitian, sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian informan juga menyatakan bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak dalam katagori cukup baik, hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat perawang barat dapat bekerja sama dengan pemerintahan dalam pembangunan yang ingin dicapai agar desa perawang barat dapat memiliki rasa kepedulian, kedisiplinan dan kerja sama dalam peranan pembangunan desa. dari 36 orang yang dijadikan informan penelitian ini, dapat di katakan peranan pemerintah dengan masyarakat cukup baik sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak adalah cukup berperan. Adapun hambatan dalam peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak yaitu faktor sumber daya manusia. Dimana desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak rata-rata tamatan sekolah dasar (SD) sehingga mempengaruhi pola pikir dari aparat pemerintah desa sehingga pemerintah desa banyak menemukan kesulitan untuk menjalankan pembangunan.

Kata Kunci : Peranan ,Pemerintah Desa,Masyarakat, Perencanaan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING IN THE VILLAGE WEST PERAWANG, TUALANG DISTRICT, SIAK REGENCY

(Study of Physical Development in 2019)

**By : Dina Anggraini Putri
NPM :147310736.**

The goal of the State of Indonesia is to improve the welfare and prosperity of its people. In an effort to carry out development in various fields, both in the short and long term, the goal of community development is to improve the economic, social and cultural conditions of the community, so that poverty and the community's living environment experience changes. The role of the Village Government in development is absolutely necessary, without the role of the development community only making the community as an object. The placement of the community as the subject of development is absolutely necessary so that the community will be able to participate actively starting from development, implementation to monitoring and evaluation of development, especially if we will approach development with the spirit of quality. The results showed that from 36 research informants, so based on the results of the recapitulation of the assessment of the informants also stated that the role of the village government in development in the village of West Perawang, Tualang District, Siak Regency was in a fairly good category, this can be explained that the West Perawang community can cooperate with the government in development to be achieved so that the village of West Perawang can have a sense of care, discipline and cooperation in the role of village development. Of the 36 people who were used as informants for this research, it can be said that the role of the government and the community is quite good, so it can be concluded that the role of the village government in development in Perawang Barat Village, Tualang District, Siak Regency is quite instrumental. The obstacle in the role of the village government in development in the village of West Perawang, Tualang District, Siak Regency, is the human resource factor. Where Perawang Barat Village, Tualang District, Siak Regency, the average elementary school graduate (SD) affects the mindset of village government officials so that the village government finds it difficult to carry out development.

Keywords: Role, Village Government, Community ,Planning

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. pembangunan tersebut di kelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, di mana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pada dasarnya pencapaian pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik.

Suatu skema baru pemerintah daerah yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini.

Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah juga harus ada sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan, masyarakat adalah membayar pajak dan masyarakat adalah subjek dalam pembangunan. Selain itu, program-program yang di rumuskan dan dilaksanakan dapat turut memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut kesejahteraan mereka dan melaksanakan sendiri serta memetik hasil program yang dicapai.

Dalam pembangunan Pemerintah Desa, merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu Pemerintah Desa dapat membangun sesuatu yang perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan Kepala Desa akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan pembangunan desa tersebut merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Pemerintah Desa sebagai objek pembangunan Pemerintah Desa terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi

kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Dimana dominasi Negara berubah menjadi institusi lokal, untuk itu peran serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan demikian Peranan pemerintah desa dalam pembangunan tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya peranan masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari pembangunan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan, terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas.

Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat local lah yang mengetahui apa permasalahan yang di hadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya, bahkan pola mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut.

Pemerintah Desa memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan kadar pembangunan seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal Pembangunan Desa pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini Pembangunan Desa masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini, pembangunan Pemerintah Desa masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal peranan Kepala Desa tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tapi juga mulai tahapan pembangunan bahkan pengambilan keputusan.

Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang terpenting bagi pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kepala desa sebagai koodinatur dan administrator pemeritahan desa. Selain itu untuk dapat terwujudnya pembangunan desa diperlukan adanya kemampuan lurah dalam bekerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat melalui lembaga-lembaga desa. Sementara itu tujuan pembangunan fisik yang dilaksanakan di desa perawang barat bersurat ada;ah tercapainya pelayanan dibidang pemerintahan dengan baik, yang sebagian besar bersifat pembangunan fisik.

secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum Negara dan pemerintahan ini terbentuk, etensitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat sitiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat, secara relatif mandiri dari campur tangan etensitas kekuasaan dari luar.

Adanya kebijakan pemerintah desa telah memberikan kewenangan kepada desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari pembangunan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pembangunan pada hakikatnya melibatkan tiga factor yaitu manusia dengan beragam perilakunya, factor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan Negara, dan factor alam yang sulit di ramal. Oleh lkarena itu penyimpangan – penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan mungkin saja dapat terjadi. Dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan sehingga penyimpangan secara lebih dini dapat segera di ketahui, guna menghindari kerugian yang lebih besar.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.

Makna utama dari undang-undang ini bagi desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom. Fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatif di wilayah kecamatan, sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi menjadi sebuah wilayah kekuasaan melainkan sekedar sebagai perpanjangan dari kabupaten.

Pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah desa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa. Pemerintah desa yang dimaksud adalah Kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa diharapkan mampu membentuk desa dengan baik dalam kemampuan ekonomi, potensi desa, kependudukan, sosial politik maupun pertahanan dan keamanan. Disini jelas bahwa pemerintah desa dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan yang perlu di perhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Desa.

Hakikat pemerintah desa adalah efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping untuk memberi peluang peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara luas dalam konteks demokrasi, dan bila dikaitkan dengan pemerintah desa yang keberadaanya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sejalan dengan otonomi daerah yang dimaksud, upaya untuk memberdayakan pemerintah desa harus dilaksanakan, karena posisi pemerintah yang paling dekat masyarakat adalah pemerintah desa.

Peran serta Pemerintah Desa dalam pembangunan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kefakuman.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Desa terdiri dari desa adat
2. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat.
3. Pengaturan tentang desa berdasarkan pada prakasa masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional.

Pengertian desa dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 “ Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu :

“bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan republic Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan di berdayakan agar kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, m akmur, dan sejahtera. Bahwa dalam susunan dan tata cara perencanaan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa pasal 5 ayat (1), Pasal 18, pasal 18B ayat 2, Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang tahun 2019 dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun dengan baik sesuai dengan skala prioritas pembangunan kampung di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Ketentuan dalam penyusun ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa atau sebutan lain yakni kampung untuk mengatur rumah tangga kampung, mengelola anggaran dan

melaksanaan proses-proses pembangunan kampung sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi kampung yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat kampung ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Dalam Penyusun RKP Kampung ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa dan Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem pembangunan secara partisipatif. pembangunan kampung disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat dan unsur yang terkait dalam pembangunan desa.

Kesadaran dan partisipasi masyarakatlah menjadi kunci dan keberhasilan pembangunan tersebut. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa akan pentingnya usaha-usaha sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi social untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa perawang barat khususnya pemerintahan desa, yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan pembanunan desa dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa perawang barat.

Salah satunya adalah pemerintah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, adapun sumber pendapatan atau anggaran desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1.1 Sumber Anggaran Yang Di Pergunakan Membiayai Program Pembangunan
Desa Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

No	Bidang / Jenis Pembangunan		Lokasi	Volume	Biaya dan sumber pembiayaan	
	Bidang	Jenis Pembangunan			Jumlah (Rp)	Sumber
1	Pembangunan Kampung	1.Pos yandu	RT. 05/ RK. 06	1 Unit	67.754.850	DK (APBN)
		2.Gedung Pendidikan	RT. 02 / RK. 06	1 Unit	150.998.000	DK (APBN)
		3.Pembangunan Jembatan / Becover Jl. Bina Tani	RT. 07 / RK. 06	1 Unit	102.542.250	DK (APBN)
Jumlah					321.295.100	

sumber : kantor Desa perawang barat 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat Perkiraan anggaran yang di pergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kampung adalah perkiraan pendapat kampung yang bersumber dari pendapatan asli kampung, dana kampung (APBN) bantuan pemerintah dan sumbangan pihak ke

tiga, sesuai kesepakatan Musrenbang RKP kampung tahun 2019 maka besaran pagu anggaran sebesar Rp.321.295.100.-.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa ini disusun sebagai mana pembangunan desa dalam system pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan desa secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya. Partisipatif disini adalah dalam ketentuan yang melibatkan pihak terkait dalam pembangunan desa perawang barat, yang dalam hal ini tentunya peranan pemerintah dan masyarakat juga harus ikut sertakan.

Berdasarkan hal di atas, sebagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

1. Pemerintah Desa dalam pembangunan desa belum mengikut sertakan unsur-unsur di masyarakat dan ada beberapa aspirasi masyarakat yang tidak di bahas, sehingga pemerintahnya kurang stabil.
2. Berdasarkan fakta lapangan pembangunan di desa terkesan belum ada inovasi-inovasi, sehingga pembanguna di lakukan terkesan masih belum terpenuhi.
3. Pemerintah Desa Perawang masih banyak terdapat kekurangan dalam bagian perencanaan pembangunannya hal ini bahwa dari sekian banyak rencana pembangunan-pembangunan yang dilakukan hanya beberapa saja yang terealisasi dalam APBD Desa Tahun 2019.
4. Pemerintah desa belum menjadi pelopor dalam Pembangunan tingkat kinerja desa masih terkesan kaku, masih tidak berjalan secara efektif dan efisien.

5. Pembangunan yang dilakukan tidak maksimal karena anggaran dana tiap tahun bertambah dan tidak diimbangi dengan adanya tahapan pembangunan.

Berdasarkan Fenomena-fenomena tersebut maka oleh karena itu keberhasilan suatu pembangunan desa tidak akan lepas dari peran serta kita semua baik pemerintah kabupaten, pemerintah desa maupun masyarakat. Melihat dari keberhasilan pembangunan maka dalam hal ini pemerintah desa harus proaktif agar pembangunan yang ada di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak bisa berhasil guna.

Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “ *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.*”

B. Rumusan Masalah

Secara uraian diatas, peranan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan ini untuk mengetahui secara terperinci apa saja menjadi melaksanakan pembangunan dalam mewujudkan pemerintahan dalam melakukan pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang Kabupaten siak, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Perawang barat?
2. Bagaimana faktor-faktor dalam perencanaan pembangunan di Desa Perawang barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa perawang barat.
- b. Untuk mengetahui factor – factor penghambat yang mempengaruhi pembangunan di Desa Perawang barat.

D. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- b) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
- c) Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Tualang dalam melaksanakan pembangunan.
- d) Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. Berikut ini dikemukakan Teori dan Konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Ilmu pemerintahan

Secara etimologis, definisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti : perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah); pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. (Pamudji, 1983 : 3). Taliziduhu (2000:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan.

Dari uraian di atas diperoleh pokok pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan sebagai:

1. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari struktur, prosedur dan rangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
3. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan atau merujuk pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat, dan oleh sebab itu Ilmu Pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama;

fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi hak masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing badan publik; dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi kewajiban masyarakat yang menjadi hak negara yang dikelola oleh badan-badan publik.

2. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, ke dua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. perbedaan pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit. pemerintah dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan melaksanakan peradilan (disebut yudikatif), (dalam Syafiie, 2009; 20)

Menurut Ndraha (2011; 3) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Widodo (2001; 2) pemerintahan lokal merupakan pemerintah didekatkan pada rakyat. Dengan demikian akan dapat dikenali apa yang akan

menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan secara aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan dibuat akan mencerminkan apa yang akan menjadi kepentingan aspirasi rakyat yang dilayani.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002;14) antara lain adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memeilihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat,menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa mamedakan status apapun yang melatar belakangi keberdaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pamarintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (dalam negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (sperti kabinet merupakan suatu pemerintahan)

Ndaraha (2010;6) mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat terhadap orang atau kelompok lain.

Menurut Iver (dalam Syafie, 2011;14) pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

1.2 Fungsi – Fungsi Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan antara lain; (Rasyid, 2002;14)

a. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

b. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

c. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

d. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta

masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

1.3 Urusan Pemerintahan

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum antara lain;

- a. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- b. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- c. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

2. Konsep Pemerintahan

2.1 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan Negara menunjukkan adanya badan pemerinthan (*institutional*) kewenangan pemerintah (*authority*) cara memerintah (*methods*), wilayah pemerintah dan sistem pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Pemerintahan tidak dapat di lepaskan dengan keberadaan pemerintah untuk memerintah yang merupakan keharusan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan pemerintahan.

Suryaningrat (1990:10) menjelaskan bahwa unsur yang menjadi ciri khas dasar pemerintah atau memerintah adalah :

1. Adanya keharusan yang menunjukkan kewajiban apa yang di perintahkan
2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi perintah dan menerima perintah
3. Adanya hubungan konsional antara yang memberi dan menerima perintah
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sedangkan rasyid (1995) , mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur, mengurus, dan memerintah dalam perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat.

Konsep pemerintahan dalam arti luas diatas, tampaknya di dasarkan pada teori yang di kemukakan oleh montesquiue dengan teorinya sangat terkenal “Trias Politica” dalam bukunya “ L Esprit des Lois”, membagi kekuasaan Negara dalam 3 bidang yang terpisah satu sama yang lain, yaitu:

- a. *Pouvoir Legislatif*, yaitu kekuasaan dalam bidang pembuatan perundang-undangan.
- b. *Pouvoir Eksekutif*, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh undang – undang.

- c. *Pouvoir Yudicatif*, yaitu kekuasaan untuk menjaga agar undang – undang tersebut dapat di jalankan dengan tujuannya.

Baik dalam wacana keilmuan pemerintahan maupun dalam pelaksanaannya, teori ini banyak mempengaruhi Negara dalam mempraktekkan ajaran pemerintahan. Akan tetapi padadataran praktek yang sesungguhnya banyak kendala, sehingga teori *Trias Politica* tidak dapat di jalankan secara murni atau sepenuhnya. Hal ini karena dalam praktek pemerintahan Negara, termasuk di Amerika Serikat menggunakan asas “ *check and balances*” antara kekuasaan eksekutif dan legislative.

Sementara untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Negara ditata sedemikian rupa baik secara vertical maupun horizontal. Penataan secara fungsionalisasi peran-peran pemerintahan Negara melalui pembentukan kelembagaan Negara baik yang terbentuk departemen maupun non departemen. Sedangkan penataan secara vertical dilakukan dengan cara pembagian wilayah republic Indonesia atas beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu:

- a. Daerah propinsi sebagai daerah otonomi terbatas yang juga merangkap sebagai wilayah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah.
- b. Daerah kabupaten / kota sebagai daerah otonomi yang di dalamnya terdapat kecamatan dan kelurahan / desa sebagai perangkat pemerintahan daerah.

2.2 Konsep Pemerintah Desa

Menurut Awang (2010: 49) pemerintah secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur,menata,melayani,mempertahankan,dan melindungi berbagai kehidupan mereka.

Menurut Widjaja (2002: 65) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Nurcholis (2001:2) desa adalah suatu wilayah yang ditanggapi oleh sejumlah orang yang saling mengenal,hidup gotong royong,memiliki adat istiadat yang relatif sama,dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatnya. Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Desa merupakan kesatuan hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Negara.Dalam pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dibentuk pemerintahan Desa.

Selanjutnya Nurcholis (2001:73) Menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD. Pemerintahan desa adalah oragnisasi pemerintah yang terdiri atas : (1) unsur pimpinan kepala desa, (2) unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas: sekretariat desa,unsur pelaksanan teknis dan unsur kewilayahan.Dari ketiga unsur tersebut memiliki unsur masing-masing.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Badan Pemusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, anggota BPD terdiri daerah ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh dan pemuka masyarakat lainnya. masa jabatan BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bahwa Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan. *Pertama* urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. *Kedua*, urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, pembangunan SMP N 3 Bunut, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. *Ketiga*

urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial dan budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

2.3 Konsep Pembangunan Desa

Menurut Siagian (2012:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Dari penjelasan Siagian tersebut dapat disimpulkan mengenai pembangunan antara lain:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berharap yang bersifat indeviden dan tanpa akhir, hal itu dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya, dan hasil yang diperoleh.
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. ini berarti peningkatan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.

- e. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensional yang mencakup seluruh segi kehidupan.

Dalam pembangunan masyarakat pedesaan perlu adanya penyesuaian lingkungan sekitarnya seperti lingkungan alam, fisik, ekonomi, sosial budaya ini mempertegas bahwa proses perubahan masyarakat pedesaan harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki desa tersebut. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan prinsip kegotong-royongan dan kekeluargaan agar kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terabaikan. Peran kepala desa disini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan.

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. *pertama*, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. *kedua*, ia mencakup keadilan (equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. *Ketiga* penumbuhan kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti

perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya

2.4 Konsep Manajemen

Menurut Siagian (2004:5) Manajemen merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajemen untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sedangkan menurut Haiman (dalam Manulang 2000:3) memberi batas tentang manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya Hasibuan (2000:2) mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dari seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Setyawan.S(2004:13) fungsi manajemen adalah segenap kegiatan yang di laksanakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan cara yang di atur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dan tercapai secara tertib,efektif, dan efisien.

Selanjutnya Terry (dalam Setyawan S (2004:14) fungsi manajemen ada 4 yang di singkat dengan (POAC),yaitu :

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
3. *Actuating* (Pelaksanaan)

4. *Controlling* (Pengawasan)

Menurut Terry (dalam Setyawan 2004:20) tercapainya tujuan hanya tergantung pada perencanaan dan pengorganisasian yang baik, Melainkan juga tergantung pada pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Hasibuan 2006:184) penggerak atau pengarah adalah kegiatan yang di lakukan oleh pemimipin atau orang yang mempunyai kewenangan untuk membimbing, menggerakan ,mengatur segala kegiatan yang telah di berikan tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha,

Selain itu,managment juga bisa di definisikan dalam persepektif menurut Riva'I dkk(2013:117).

1. Menurut perspektif proses, manajmen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain, dimana kegiatan di awasi dan di selenggarakan,
2. Defenisi dari perspektif kolektifitas orang, dari sudut pandang ini manjamen diartikan sebagai kelektivitas orang yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan manajerial.
3. Pengertian manajemen menurut persepektif seni dan ilmu Manajemen sebagai seni merupakan pengimplementasi sari keterampilan–keterampilan dalam pengelolaan organisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dan bermrnfaat. Sementara itu, manajemen sebagai ilmu terlihat dari penerapannya terhadap proses mengobservasi ,mengumpulkan, dan menganalisa data, fenomena-fenomena, kejadian-kejadian , dan lain-lain yang hendak dicapai.

4. Terkait dengan pengertian manajemen yang dilihat dari 3 perspektif di atas, Desa sebagai organisasi publik yang berada di tingkat terendah dalam struktur organisasi publik, juga membutuhkan definisi tersebut dalam implementasinya secara menyeluruh.
5. Karena, desa juga komponen organisasi yang begitu kompleks dan tidak sedikit. Seperti semua masyarakat yang dari segi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah. Belum lagi desa juga harus memahami tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah sehingga tidak mudah untuk menerima hal-hal yang baru.
6. Belum lagi mengenai pertanggung jawaban terhadap pemerintah yang berada di atasnya dalam hal penggunaan Anggaran Dana Desa. Kegiatan-kegiatan organisasi sekomples itulah yang harus mampu di *-manage* oleh seseorang kepala desa..

2.5 Konsep Inovasi

Inovasi dalam sebuah organisasi pemerintahan saat ini merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kata inovasi berasal dari Inggris *innovation* berarti perubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan sebagai pola – pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Adapun inovasi yang berkaitan dengan proses banyak berorientasi pada metode, teknik, ataupun cara berkerja dalam

rangka menghasilkan sesuatu yang bar. Selanjutnya inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan definisi tersebut lebih ditunjukkan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut sesungguhnya membentuk kesatuan yang utuh (Makmur dan Rohana 2012:9).

Menurut Halversen dkk (2003) membagi tiga tipe spectrum inovasi dalam sector public:

1. ***Incremental innovation to radical innovation*** (ditandai oleh tingkat perubahan perbaikan incremental terhadap produk, proses pelayanan yang sudah ada).
2. ***Top down innovation to bottom-up innovation*** (ditandai oleh mereka yang mengawali proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top menagmen atau organisasi atau institusi didalam hirakhi, bermakna dari para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negri, pelayan masyarakat, dan pembuatan kebijakan di level menengah).
3. ***Need led innovation anda efficiency-led innovation*** (ditandai apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efesien).

Mulgan dan Alburi dalam sangkala (2013:31) memperkenalkan bahwa ada tiga tipe inovasi (incremental, radikal, dan sistematik) bersumber dari level yang berbeda (local, lintas, organisasi, dan nasional), yang dihasilkan dalam instasi pemerintahan yang memerankan tiga kebijakan yang saling terkait dan tertarik dengan inovasi:

- a. Inovasi kebijakan : arah insiatif kebijakan baru
- b. Inovasi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan untuk mempercepat inovasi penggabungan.
- c. Inovasi top/down dimana perubahan spesifik didorong memalalui penerapan system dengan preskripsi regulasi dan dukungan, serta inovasi bottom-up dimana pemerintahan memberikan kemungkinan dan memfasilitasi pengembangan dan penggabungan (difusi) yang berasal dari organisasi atau jaringan didalam system. Rogers (2003) mendefinisikan diffusion sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu terus menerus antar anggota system social(2003). Patut dicatat dalam litelatur bahwa focus pada mekanisme dan proses dimana inovasi di terapkan di adopsi oleh organisasi lain (diffuse atau disseminasi) adalah penting sebagai focus pada aslinya kelahiran Mulgan Dan Alhuri(dalam Sangkala(2013:32).

2.6 Konsep Peranan

Peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasionol, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah,penyesuaian dan kesenambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai.

Menurut Ndraha (2003:53) Peranan diartikan suatu sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Siagian (2012:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Dari penjelasan Siagian tersebut dapat disimpulkan mengenai pembangunan antara lain:

- g. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatanyang berlansung terus menerus dan berharap yang bersifat indeviden dan tanpa akhir,hal itu dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu,biaya,dan hasil yang diperoleh.
- h. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dilaksanakan.
- i. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
- j. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan.ini berarti peningkatan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
- k. Pembangunan mengarah pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya,cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.

1. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensional yang mencakup seluruh segi kehidupan.

Dalam pembangunan masyarakat pedesaan perlu adanya penyesuaian lingkungan sekitarnya seperti lingkungan alam, fisik, ekonomi, sosial budaya ini mempertegas bahwa proses perubahan masyarakat pedesaan harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki desa tersebut. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan prinsip kegotong-royongan dan kekeluargaan agar kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terabaikan. Peranan kepala desa disini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan.

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. *pertama*, berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap yang diperlukan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. *kedua*, ia mencakup keadilan (equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. *Ketiga* penumbuhan kuasa dan wewenang manfaat tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan. Dan pada akhirnya pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang kelangsungannya.

Menurut Sondang Siagian (2018:142-149) menyebutkan bahwa peranan pemerintahan desa dalam pembangunan.

a. Sebagai Stabilisator

peranan pemerintah dalam pembangunan yang dipertegas oleh Siagian (2012:143-145) menyatakan bahwa peran pemerintah selaku stabilisator terbagi kedalam beberapa bagian yaitu:

1. Stabilisator bidang politik

Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan dalam kehidupan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar peranan pemerintah disini memberi maksud bahwa pemerintah desa (kepala desa beserta perangkatnya) mempunyai peranan dalam pembangunan. Peranan kepala desa sebagai stabilisator menjelaskan bahwa kepala desa harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul dimasyarakat desanya, beberapa peran penting yang mestinya dilaksanakan oleh kepala desa secara efektif dan efisien sebagai stabilisator yaitu: menjaga stabilitas politik yang ada di Desa yang dia pimpin.

Hal tersebut memberi maksud bahwa kepala desa harus mampu menjaga kestabilan politik yang ada di Desa, karena kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan di Desa tidak akan mendapat berlangsung dengan mantap tanpa adanya stabilitas politik.

2. Stabilisator bidang ekonomi

Peran sebagai stabilisator ekonomi yang dimaksud adalah menciptakan iklim atau kondisi yang memungkinkan perekonomian nasional dalam terpelihara sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kepentingan nasional. Peran kepala desa disini memberi maksud bahwa kepala desa harus mampu menjaga kestabilan ekonomi di Desa yang dia pimpin.

3. Stabilisator bidang sosial budaya

Peran pemerintah dibidang sosial budaya terlihat bahwa menjadikan bangsa menjadi masyarakat yang maju dan modren,tanpa kehilangan jati drinya.Peran kepala desa selaku stabilisator dalam bidang sosial dan budaya adalah mampu mewujudkan perubahan dan tidak berubah menjadi gejolak sosial apalagi yang dapat mengancam keutuhan masyarakat di Desa itu sendiri.

b. Sebagai Inovator

Menurut Siagian (2012:145-146) Inovasi merupakan salah satu “produk”dari kreativitas. Yang meski dilakukan oleh pemerintah selaku inovator yaitu:

1. Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintahan

Peran kepala desa dalam hal melakukan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri sangat perlu dilakukan,tersebut inovasi dapat merubah pola kerja aparatur pemerintah dan inovasi tersebut dapat merubah dalam hal

cara bekerja dengan cepat tetapi aman, sistem kerja yang sederhana, transparan, dan cara berfikir yang didasarkan pada pelayanan.

2. Inovasi yang sifatnya konseptual

Peran pemerintah disini menjelaskan bahwa pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merupakan sumber dari ide-ide baru. Peran kepala desa sebagai pemimpin di desa harus mampu menjadi sumber ide-ide baru untuk dapat meningkatkan pembangunan di desa yang dipimpinnya.

3. Inovasi sistem, prosedur dan metode kerja

Peran pemerintah dalam bidang ini menjelaskan bahwa pemerintah harus membuat suatu inovasi sistem, prosedur serta metode kerja karena cenderung pemerintah selama ini berkerja menggunakan pendekatan legistik seperti mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan formal saja. Dan dalam hal ini peran kepala desa harus dapat berkerja dengan sistem, prosedur, dan metode kerja yang tidak menghilangkan legalitas akan tetapi lebih kebudayaan manajemen yaitu bekerja sebagai pelayanan yang memuaskan para pelanggan. jadi dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal baru.

c. Sebagai Pelopor

Disamping itu Siagian (2012:148) menjelaskan bahwa selain peran sebagai inovasi pemerintah harus juga memainkan peran selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, selaku pelopor aparatur pemerintah harus menjadi panutan (*rule model*) bagi keseluruhan masyarakat.

Peranan sebagai pelopor Kepala Desa harus menjadi orang yang mampu memberikan contoh bagi seluruh masyarakat. Kepala Desa adalah orang yang berdiri dirgarda depan. Peranan Kepala Desa sebagai pelopor dapat dilihat melalui tindakan sebagai berikut:

- 1) Kepoloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin.
- 2) Kepoloporan dalam hal kejujuran.
- 3) Kepoloporan dalam hal penegakan disiplin.
- 4) Kepoloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
- 5) Kepoloporan dalam kesediaan berkorban demi kepentingan bersama.
- 6) Kepoloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, dan lain-lain

d. Sebagai Modernisator

Melalui pembangunan setiap Negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, di perlukan sederajat oleh Negara-negara lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain :

1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kemampuan dan kemahiran manajerial.
3. Kemampuan mengelolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.

4. Sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif.
5. Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis.
6. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan.
7. Rakyat yang dibedakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang “ nasibnya”.
8. Kesiapan mengambil resiko.
9. Orientasi masa depan
10. Bersedia menerima perubahan.

Pengalaman banyak Negara menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peran penting itu, proses modernisasi harus terjadi dilingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

e. Selaku Pelaksana Sendiri

Kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan Negara, modal yang terbatas kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan arena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Maka dari itu, pemerintah masih di tuntut untuk memainkan peran selaku pelaksanaan sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Sedangkan menurut Soekanto (2001;269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat;

Menurut Soekanto (2002;243) pengertian peranan adalah sebagai berikut peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan

Peranan juga bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan masyarakat dengan cara menyediakan atau memberikan fasilitas yang dipergunakan masyarakat untuk mengatasi masalah.

Menurut pengertian peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tak dapat di pisah – pisahkan,karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.

2.7 Konsep Kepemimpinan Pemerintah Desa

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang di katakana sebagai pemimpin adalah semua orang yang di sertai tugas dan

tanggung jawab seperti halnya diri sendiri, bapak/ibu dalam rumah tanggapun juga disebut pemimpin.

Keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan sangat di pengaruhi oleh kemampuannya, kemahirannya, serta kejelian untuk mengerti dan memahami keadaan masyarakat dimana berlangsung proses kepemimpinan itu.

Ndraha (2001:216) menjelaskan kepemimpinan adalah gejala social, kemampuan sesuatu (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga (agar) perilaku orang lain itu berubah atau tetap, menjadi integratif. Dalam situasi integrative itu, seseorang menjadi akseptabel bagi orang lain, Wennes terbentuk. Orang yang (*terbukti*) memiliki kepemimpinan disebut pemimpin jadi pemimpin itu tidak *given* ,melainkan *achieved* . Hasil kegiatan memimpin suatu unit kerja di sebut pimpinan (sama seperti pekerjaan memasak terbut masakan.

Selain itu soekanto (2012:250) menjelaskan kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang (pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang di pimpin atau pengikut –pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana di kekehendaki oleh pemimpin tersebut.

Sedangkan Nawawi (2003:306) fungsi pemimpin adalah agar bisa membina, memotivasi, mengarahkan dan memberikan kepercayaan kepada individu-individu dalam organisasi . Hal ini di karenakan individu-individu sangat menentukan sukses dan gagalnya seorang pemimpin dalam

melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi tidak dapat menunggu untuk mendapatkan individu-individu dalam organisasi yang cakap sesuai yang di butuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada . Oleh sebab itulah, seseorang pemimpin harus dapat memberdayakan bawahan / staf agar semaksimal mungkin individu-individu yang ada dan bekerja dalam organisasi dapat profesional serta bekerja sama mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya kartini kartono (2009:80) menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan terbagi atas :

a. Tipe Kharismatik

Tipe ini daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu.

b. Tipe Paternalistik

Tipe Kepemimpinan dengan sifat-sifat antara lain :

1. Menganggap bawahannya belum dewasa
2. Bersikap terlalu melindungi
3. Jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan
4. Selalu bersikap maha tahu dan maha benar

c. Tipe Otoriter

Pemimpin tipe otoriter mempunyai sifat sebagai beriku:

1. Pemimpin Organisasi sebagai miliknya
2. Pemimpin bertindak sebagai dictator

3. Cara menggerakkan bawahannya dengan paksaan dan ancaman.

d. Tipe Militeristik

Dalam tipe ini pemimpin mempunyai sifat-sifat :

2. Menuntut kedisiplinan yang kera dan kaku
3. Lebih banyak menggunakan sistem perintah
4. Menghendaki keputusan mutlak dari bawahan
5. Formalitas yang berlebihan-lebihan
6. Tidak menerima saran dan kritik dari bawahan
7. Sifat komunikasinya secara sepihak.

e. Tipe Demokratis

Tipe demokratis menggunakan masalah kerja sama sehingga terdapat kordinasi pekerjaan dari semua bawahan. Kepemimpinan demokrasi menghadapi sikap individu, mau mendengarkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun. Jadi pemimpin menitik beratkan pada aktifitas setiap anggota kelompok, sehingga semua unsur organisasi di libatkan dalam aktivitas, yang simulai penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan disiplin.

Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka kepala dsa harus dapat menjalankan program pembangunan di desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin, Sebagaimana yang di jelaskan

Atmosudirdjo (2002:212) bahwa seseorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

- a. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang sekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalaman yang rekavan dengan tugas yang dia beban.
- b. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sekitarnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.
- c. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada tugasnya serta kepada pemerintahannya dan sebagainya.
- d. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua factor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan dari kutipan diatas jelaslah kepemimpinan kepala desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan pancasila sejadi. Bukanlah kepemimpinan yang bersifat ugal-ugalan, akan mudah di pengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak.

2.8 Konsep Pemerintahan Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan di atur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahan. Calon kepala

desa yang memperoleh sura terbanyak dalam pemilihan kepala desa di tetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisinalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hokum adat setempat yang di tetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa adalah pimpinan dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dan pemerintahan desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat di perpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikordinasikan saja oleh camat.

Wewenang kepala desa antara lain :

- a. Memimpiin penyelenggaran pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama badan permusyawaratan.
- b. Mengajukan rencana peraturan desa.
- c. Menetapkan perarturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa (APB Desa) untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD.

B. Penelitian Terdahulu

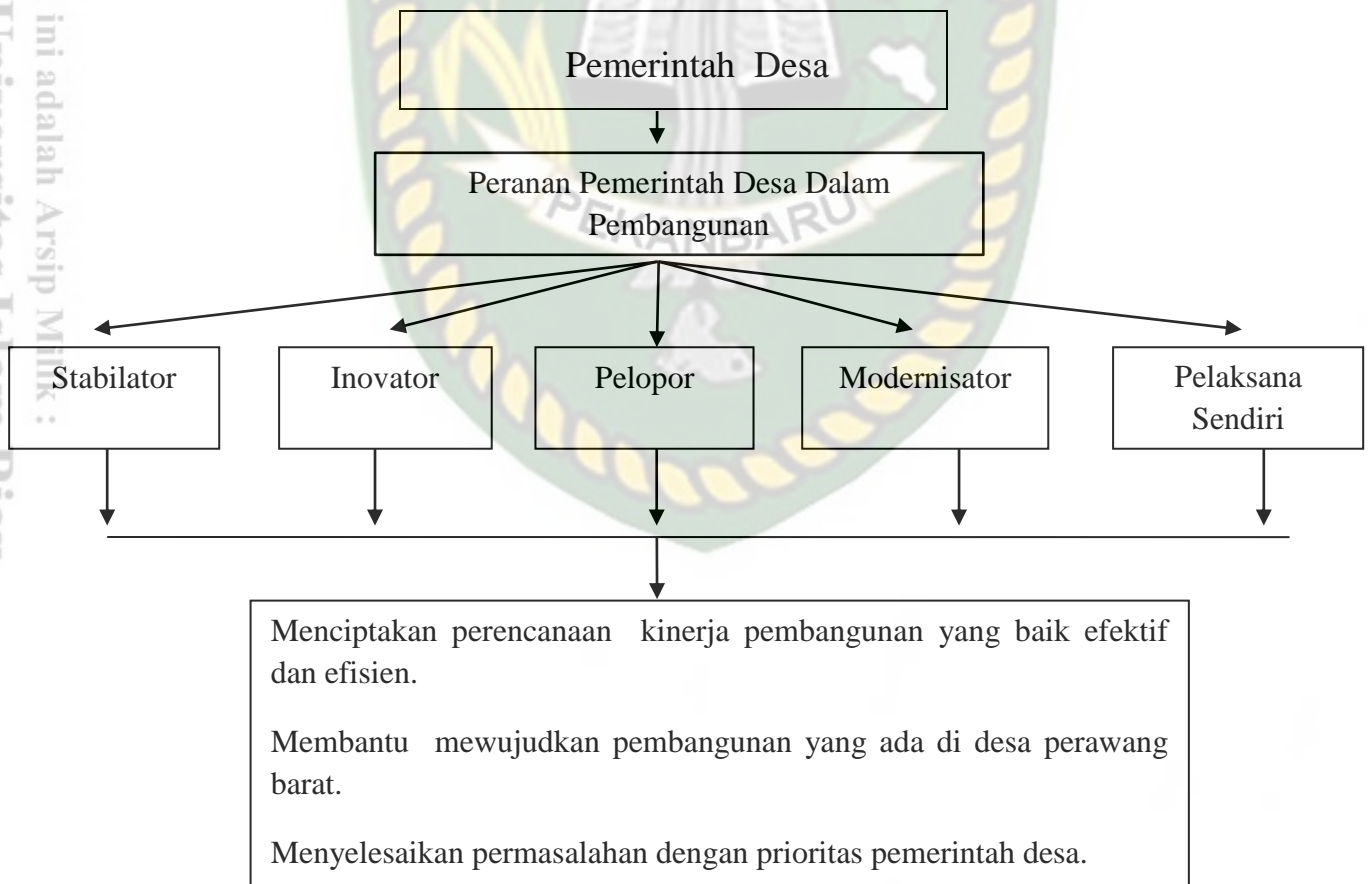
Tabel 1.2. Penelitian yang dilakukan dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rafiko (Skripsi)	Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan Desa Di Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan	Melaksanakan urusan kepala desa dalam pembangunan	a.Lokasidesa merbau b.metode kuantitatif c.tahun 2015 melaksanakan pembangunan desa
2.	Steffy Adelia Tindi (Jurnal)	Peranan Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng.	perencanaan pembangunan	a.lokasi desa pineleng b.metode kuantitatif c.tahun 2011

3.	Sherly Gresita Apriliani (Thesis)	Peranan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.	Pengelolaan dana desa untuk pembangunan	a.lokasi desa kedungrejo b.metode kuantitatif c.tahun 2009 pengelolaan dana untuk desa
----	--	--	---	---

C. Kerangka Pikiran

Tabel II.I. Kerangka Pemikiran Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019 Dari Teori Siagian (2018:142)

a. Proposisi Penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang sudah dibangun dalam penelitian, ini maka penelitian mengaju proposisi penelitian. Bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak di tentukan oleh atau di dukung melalui peran :

1. Stabilator
2. Inovator
3. Pelopor
4. Modernisator
5. Pelaksana sendiri

b. Konsep Operasional

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa penelitian dan factor penelitian ini yang di operasikan melalui beberapa indicator sebagai berikut:

- a. Peranan adalah suatu upaya atau kemampuan maupun perilaku dari pemerintah yang menduduki jabatan pemerintahan desa agar dapat menggerakkan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran dan perencanaan dalam pembangunan desa untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi masyarakat.
- b. Pembangunan desa adalah suatu proses perubahan dan perbaikan yang dilaksanakan sudah terencana dan terarah dari suatu Inovasi-inovasi yang baik menuju keadaan yang lebih baik yang ada berlangsung didesa.

- c. Pemerintah desa adalah perencanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa
- d. perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang di rencanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dengan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
- e. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa adalah usaha-usaha dan upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat pada organisasi Pemerintahan Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa melalui pertumbuhan, perubahan dari segala aspek kehidupan masyarakat desa.
- f. peranan stabilator dalam penelitian ini adalah iklim yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendah nya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrilisasi berlangsung dengan baik, dan kebijakan moneter dan fiscal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional.
- g. peran innovator dalam penelitian ini adalah menerapkan inovasi dilikungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu, inovasi yng sifatnya konsepsional, dan inovasi sitem prosedur dan metode kerja.

- h. peran modernisator dalam penelitian ini adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran menejerial dan kemampuan mengelola kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
- i. peran pelopor dalam penelitian ini adalah kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam kejujuran seperti dalam hal pemberantasan korupsi dan kolusi, dan kepeloporan dalam penegakan disiplin seperti dalam ketaatan pada jam kerja yang berlaku.
- j. peran pelaku pelaksana sendiri dalam penelitian ini adalah mampu mempertahankan kedaulatan, mampu berpartisipasi dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, dan untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan.

C. Operasional Variabel

Adapun Operasional variabel dalam penelitian mengenai peranan pemerintah kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa perawang kecamatan tualang kabupaten siak adalah sebagai berikut :

Tabel. II.2. Operasional Variabel Peranan Pemerintah Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Didesa Perawang Barat.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peranan (Siagian 2018;14 2)	Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa	1.Stabilisator	a. menjaga stabilitas politik yang adat desa. b. menjaga iklim dan kondisi perekonomian masyarakat c. menjaga dan mewujudkan perubahan agar tidak terjadi gejolak secara ancaman
		2.Inovator	a. menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan desa. b. inovasi yang sifatnya konseptual c. inovasi sistem prosedur, dan metode kerja

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
		3.Pelopor	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan memanfaatkan waktu dengan oreantasi hasil yang maksimal. b. Kepeloporan dalam kejujuran, penegakan disiplin,dan ketaatan.
		4. Modernisator	<ul style="list-style-type: none"> a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi b. kemampuan dan kemahiran manajeial c. kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi
		5.Pelaksana Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> a. mampu mempertahankan kedaulatan b. kemampuan berpartisipasi dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat c. kemampuan untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan penulis menggunakan penelitian survey dimana data informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan dilapangan dan dijadikan dasar untuk menggambarkan setiap indicator dan menggali lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan Metode Kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif, dan hasil penelitian Kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dengan alasan penulis memilih Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Karena penulis menemukan fenomena indikasi pembangunan yang masih dalam tahap Dan ingin melihat sejauh mana inovasi-inovasi peranan pemerintah Desa untuk Pembangunan Di Desa Perawang barat.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian

yang penulis yang di pilih makin terarah sejalan dengan terarahnya focus penelitian. *Selection to the point of redundancy* Pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah ketitik jenuh.

Adapun yang menjad informan Peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa.
2. Kaur Pembangunan.
3. Kepala Dusun.
4. Ketua BPD
5. Ketua RT
6. Ketua RW
7. Tokoh Masyarakat (Adat)

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara responden. Dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden tentang pendapat yang berkaitan dengan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan, Seperti Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW Dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data/diperoleh dari tangan kedua seperti hasil dari hasil penelitian orang lain, tulisan dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji. Dalam penelitian ada beberapa data skunder yang diterbitkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPKam) Tahun 2019. Dan dengan data yang dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari jumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa data jumlah sejarah singkat, struktur organisasi, jumlah perangkat desa di desa perawang barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam teknik pengumpulan data ini adalah sebagai berikut: Hurberman (1992)

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait yaitu kepala desa, ketua RT dan masyarakat..

b. Observasi

Observasia dalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara datang cara

pendekatan dan pengamatan langsung terkait dengan Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bukti fisik dari pengambilan data berupa foto penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Setelah Melakukan analisa data yang diperlukan terkumpul menurut jenisnya, dan penulisan ini menggunakan *Model Interaktif* Miles dan Huberman (1992) .Model Interaksi analisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan , pengabstrakan ,dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan , Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, pemersalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya selama pengumpulan data berlangsung.

2. Penyajian Data

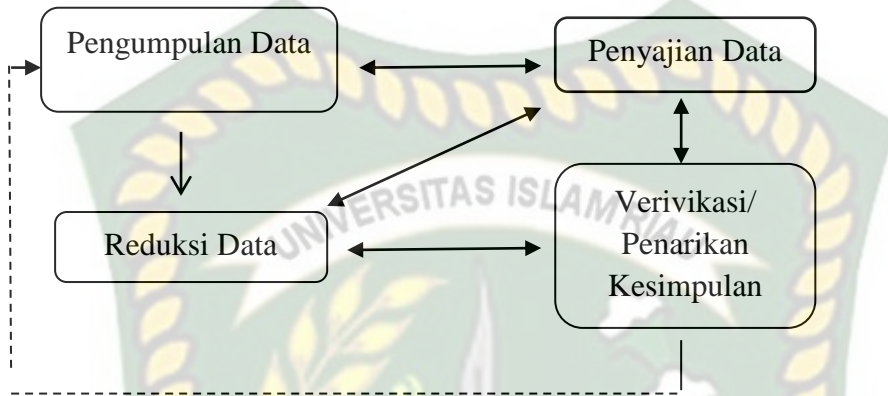
Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi : berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang padu dan mudah diraih . Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang di kisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi.

Penarikan Kesimpulan menurut Mile & Huberman hanyalah sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh . Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat di pertanggung jawabkan . Secara skematis

proses analisa data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut :



Bagan 2: Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian.

Kegiatan Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember dan penyusunan skripsi diakhiri bulan Maret tahun 2019 sesuai dengan jadwal penelitian yang telah direncanakan sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2019.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019– 2020															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Penelitian	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■											
3	Perbaikan UP						■										
4	Pengurusan rekomendasi penelitian							■	■								
5	Penelitian lapangan									■							
6	Pengelolaan dan analisis data											■	■				
7	Konsultasi Bimbingan Skripsi													■	■		
8	Konsultasi perbaikan skripsi																■
9	Ujian skripsi																■
10	Revisi dan perbaikan skripsi																■
11	Penggandaan serta penyerahan skripsi																■

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Agar tidak terjadi kekeliruan, maka disusun Rencana sistematika Laporan penulisan sebagai berikut :

Pada Bab I membahas tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan serta kegunaan penelitian.

Pada Bab II membahas tentang studi kepustakaan dan kerangka pikir yang terdiri dari studi kepustakaan, kerangka pikir, hipotesis, propesisi penelitian konsep operasional, operasional variable dan teknik pengukuran.

Pada Bab III membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, instrument penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Perawang Barat

Sejarah Desa Perawang Barat adalah salah satu Desa hasil dari pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Tualang berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2002. Wilayah Desa Perawang Barat sebelum dimekarkan dari Desa induk adalah suatu Desa yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur desa, hasil dari pemekaran tersebut pada saat ini Desa Perawang Barat maju pesat dalam pembangunan maupun perekonomian, hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya letak posisi Desa Perawang Barat yang strategis berada di Jalan Raya Perawang merupakan pintu masuk ke Kecamatan maupun ke Kabupaten, luas wilayah serta pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk setiap bulannya yang terus meningkat seiring dengan pembangunan pemukiman / perumahan oleh pihak swasta.

1. Keadaan Geografis Kabupaten Siak

Luas wilayah perawang barat adalah 45,18 km² yang terdiri dari :

- | | | |
|------|------------------|-------------|
| I. | Tanah sawah | : 4.675 Ha |
| II. | Tanah pekarangan | : 2,61 Ha |
| III. | Tanah tegalan | : 30.900 Ha |
| IV. | Perkebunan | : 40,466 Ha |
| V. | Tanah pemda | : 103 Ha |
| VI. | Dan lain-lain | : 2000 Ha |

- a. Jarak Desa dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah 2 km yang bisa ditempuh dalam waktu 5 menit
- b. Jarak Desa dengan pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 40 Km yang ditempuh dalam waktu 50 menit.
- c. Jarak Desa dengan pusat pemerintahan provinsi adalah 30 Km yang ditempuh dalam waktu 35 menit
- d. Jarak Pusat Pemerintahan Desa dengan Pusat Dusun terjauh 12 Km

Dilihat dari bentang wilayah, Desa Perawang Barat mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pinang Sebatang Barat
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Perawang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Meredan Barat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Minas.

B. jumlah Penduduk Desa Perawang Barat

Jumlah penduduk di Desa Perawang Barat selama tahun 2015-2019 telah menunjukkan peningkatan jumlah dari populasinya dengan adanya pertumbuhan populasi penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap pendidikan, semakin

banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan juga akan semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk di Desa Perawang Barat dalam kurun waktu 2015-2019 akan disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL 1.3 PERTUMBUHAN PENDUDUK DESA PERAWANG BARAT
KECAMATAN TUALANG DALAM KURUN WAKTU 2015 – 2019**

No	Tahun	Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Jumlah keseluruhan penduduk	Keterangan
1.	2015	10.737	9.005	19.742	19.742
2.	2016	11.647	9.570	21.037	21.037
3.	2017	12.018	10.055	22.077	22.077
4.	2018	12.295	10.327	22.622	22.622
5.	2019	12.309	10.334	22.643	22.643

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Perawang Barat, 2019

Menurut data diatas perkembangan penduduk pada kurun waktu 5 tahun kebelakang menunjukkan suatu pertumbuhan yang cukup besar. Ini menunjukkan pada tahun 2015 jumlah penduduk Desa Perawang Barat sebanyak 19,742 jiwa, sampai pada tahun 2019 jumlah penduduk meningkat menjadi 22,643 jiwa. Oleh karena itu jumlah penduduk di Desa Perawang Barat berjumlah 22,643 jiwa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

TABEL 1.4 JUMLAH PENDUDUK DESA PERAWANG BARAT

Jumlah Penduduk Desa Perawang Barat (orang)	Jumlah Penduduk Laki-laki (orang)	Jumlah Penduduk Perempuan (orang)	Jumlah KK
22.643	1.309	10.334	4.686

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Perawang Barat, 2019

Jika dilihat dari keadaan topografi Desa, secara umum keadaan topografi Desa Perawang Barat adalah merupakan Dataran Tinggi yang berbukit-bukit. Sedangkan Desa Perawang Barat mempunyai Iklim Tropis (dua musim).

C. Pendidikan

Tingkat Pendidikan di Desa Perawang Barat relatif masih rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.5 TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Tidak bersekolah	3.635
SD/Madrasah	5.758
SMP/Sederajat	5.525
SMA/SMK/Sederajat	7.245
Sarjana Muda	1.98
Strata I/ (SI)	277
Pasca Sarjana	5
Jumlah	22.643

Sumber: Kantor Desa Perawang Barat, 2019

diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang duduk di bangku SMA/SMK/Sederajat yaitu sebanyak 7.245 orang, Sedangkan jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya paling sedikit adalah tingkat Akademi (S2) adalah sekitar 5 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Perawang Barat tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mengedepankan pendidikan rakyatnya. Tingkat pendidikan yang masih relatif rendah menjadi tantangan yang besar bagi Desa Perawang Barat dalam membangun desa.

D. Keagamaan

Penduduk asli di Desa Perawang Barat adalah melayu yang mayoritas beragama Islam. Suasana keagamaan tampak begitu hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini ditandai dengan berdirinya sarana-sarana ibadah sebagai wahana untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Adapun yang beragama selain Islam hanya sebagian kecil saja dan merupakan penduduk pendatang. Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang tergambar dalam tabel dibawah ini:

TABEL 1.6 SARANA IBADAH MASYARAKAT DI DESA PERAWANG BARAT

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	16
2.	Mushalla	16
3.	Gereja	8
4.	Pura/Wihara	5

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Perawang Barat, 2019

Masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir setiap dusun mempunyai beberapa Mesjid dan Mushalla yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-upacara keagamaan lainnya, termasuk pula tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung.

E. Kebudayaan Masyarakat

Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa. Kebudayaan dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena kebudayaan yang lahir dari potensi budaya yang dimiliki manusia itu sendiri.

Budaya suatu wilayah merupakan cerminan dari adat istiadat yang terkait dengan kehidupan manusia dalam dimensi sosial dan diperoleh dari hasil kajian kreatif manusia. Oleh karena itu budaya suatu daerah sangat erat hubungan dengan sistem. Masyarakat Desa Perawang Barat tidak terlepas dari pengaruh budaya yang dibawa dari luar, namun mereka tetap melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun tanpa merusak hubungan sosial terhadap pewaris budaya lain. Hal ini terlihat dengan tetap terjaganya keharmonisan hidup antara satu suku dengan suku lainnya. Pada umumnya masyarakat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang adalah suku melayu. Masyarakat sangat menjunjung tinggi persaudaraan dengan menerapkan sistem kekeluargaan.

F. Ekonomi Masyarakat

Mata pencarian masyarakat Desa Perawang Barat cukup beragam, namun didominasi oleh para petani, pegawai swasta, pegawai negeri dan lain-lain, Sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 1.7 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA PERAWANG BARAT

Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
Pegawai Negeri Sipil/Guru	98
TNI/Polri	23
Pertanian	396
Industri/Swasta	9.380
Sburuh	1.861
Perdagangan	187
Jasa Lainnya	349
Tidak bekerja	1.260
Jumlah	13.018

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Perawang Barat, 2019

Pola penggunaan tanah Desa Perawang Barat pada umumnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perkebunan, sekolah, tempat ibadah, dan sarana kesehatan. Sedangkan masyarakat Desa Perawang Barat yang memiliki ternak Dari 4.686 KK yang ada, 20% KK selain yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tetapnya juga sebagian lahan pemukiman digunakan untuk pemeliharaan ternak antara sapi, itik, kerbau, ayam buras, ayam kampung maupun ayam ras petelur dan ikan.

Guna menyusun kebijaksanaan pembangunan diberbagai bidang, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat yang diperlukan indikator dan informasi mengenai keadaan sosial ekonomi penduduk itu sendiri. Dengan adanya berbagai informasi ini, perencanaan kebijaksanaan pembangunan akan lebih terarah guna mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.

G. Sarana dan Prasarana Masyarakat

Untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada di masyarakat Desa Perawang Barat, maka terdapat fasilitas yang digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Antara lain dapat dilihat pada tabel berikut.

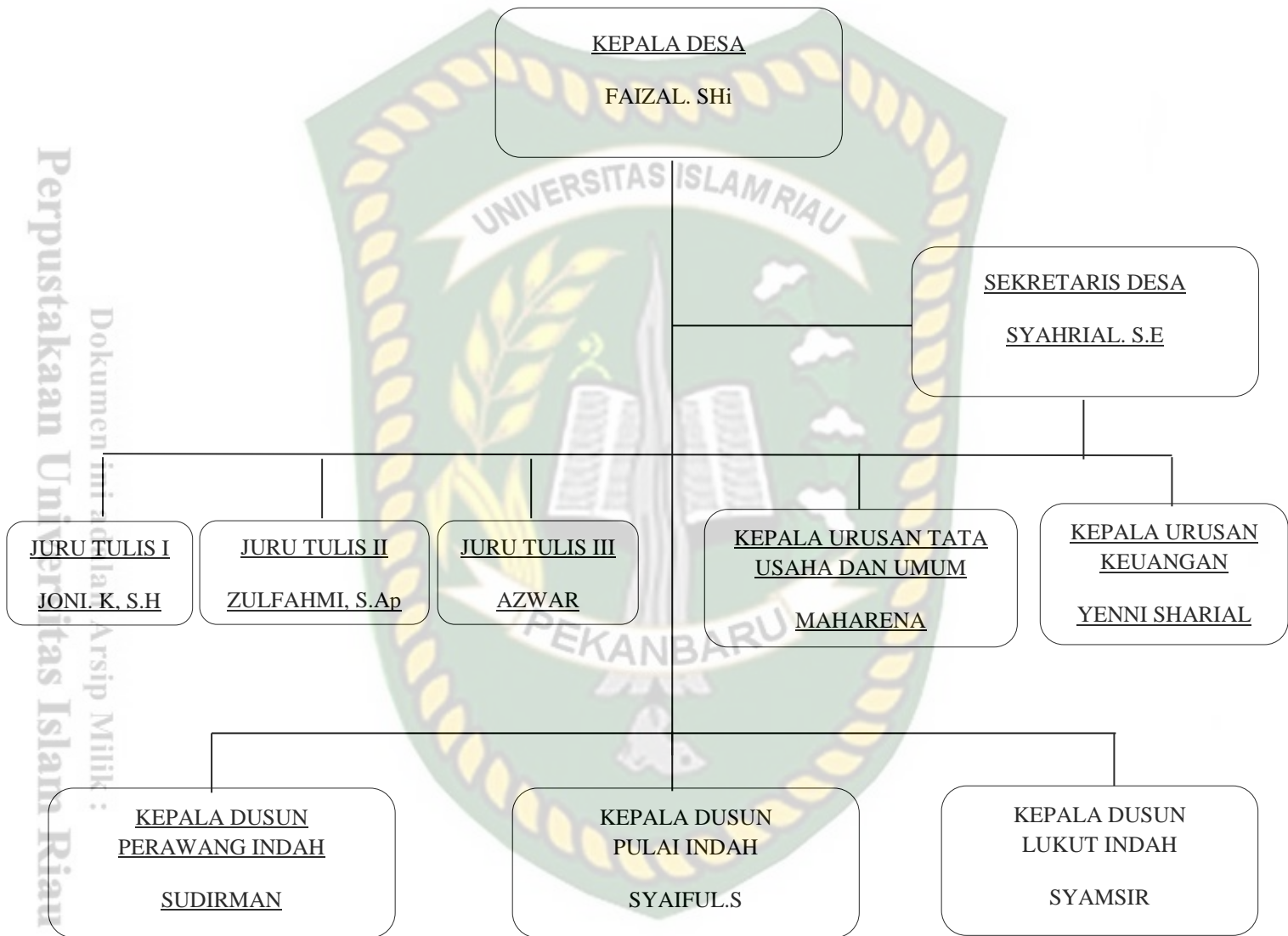
**TABEL 1.8 SARANA DAN PRASARANA UMUM DESA PERAWANG
BARAT**

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Jalan (unit)	300
3.	Panjang Jalan (km)	20.000
4.	Jembatan (unit)	-
5.	Air bersih (unit)	5
6.	Perpipaan air bersih (m)	-
7.	MCK (unit)	-
8.	Siring penahan jalan	-
9.	Gorong-gorong (unit)	5
10.	Irigasi (unit)	-
11.	Pintu Air (unit)	-
12.	Listrik Desa (unit)	-
13.	Gedung Sekolah (unit)	18
14.	Puskesmas (unit)	0
15.	Posyandu (unit)	7
16.	Mushalla (unit)	16
17.	Masjid (unit)	16
18.	KUD (Unit)/UED SP	1
19.	Penggilingan Padi (unit)	-
20.	Pasar (mingguan)	-

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Perawang Barat, 2019

A. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perawang Barat

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.



Sumber: Kantor Kepala Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 2019

B. Fungsi Dan Tugas Organisasi

1. Kepala Desa

a. Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
2. Menyelenggarakan tugas pembangunan
3. Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan

b. Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan peraturan Desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan Desa
6. Membina kehidupan Desa
7. Membina kehidupan masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna

13. Mengkordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf membantu Kepala Desa memimpin. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud memimpin dan menjalankan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

a. Sekretaris Desa mempunyai Tugas:

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan Sekretaris Desa
3. Merumuskan kegiatan Kepala Desa
4. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
5. Menyusun rencana APBDES
6. Melaksanakan administrasi keuangan
7. Melaksanakan administarsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

8. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan tugas kesekretariatan.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemeritahan adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas:

1. Kegiatan administarsi kependudukan dan catatan sipil
2. Kegiatan administarsi pertanahan
3. Pencatatan administrasi Dsea
4. Kegiatan ketentraman dan ketertiban pertanahan sipil
5. Penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Desa
6. Tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

4. Kepala urusan pembangunan adalah membantu sekretaris Desa dengan tugas:

1. Kegiatan administrasi pembangunan Desa
2. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa
3. Menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi Desa
4. Mencatat dan mempersiapkan badan usulan kegiatan pembangunan
Desa
5. Tugas-tugas lain yang diberikan atasan

5. Kepala Urusan Umum adalah membantu Sekretaris Desa dengan Tugas:

1. Melaksanakan tata kearsipan pengendalian surat masuk dan keluar
2. Mempersiapkan dan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya
3. Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor
4. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa
6. Pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
7. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di Desa
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang tidak di urus oleh urusan lainnya
9. Tugas-tugas yang diberikan atasan

6. Kepala Urusan Keuangan adalah membantu Sekretaris Desa dengan Tugas:

1. Tugas pokok: membantu Sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa mempersiapkan bahan penyusun APBDes
2. Fungsi: pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa, persiapan bahan penyusun.

7. Kepala Urusan Kemasyarakatan Desa adalah membantu Sekretaris Desa dengan tugas dan fungsi:

1. Tugas kaur kemasyarakatan ialah Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan.
2. Fungsi kaur kemasyarakatan ialah penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan, penyiapan dan pelaksanaan perkembangan kehidupan beragam, penyiapan dan pelaksanaan perkembangan kehidupan beragam.

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala dusun di angkat dan diberhentikan oleh Camat atas saran yang di usulkan Kepala Desa.

1. Tugas Kepala Desa adalah sebagai membentuk pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayahnya.
2. Tugas Kepala Desa adalah melakukan tugas diwilayah kerjanya
3. Fungsi kepala Dusun:
 - a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa
 - b) Melaksanakan keputusan Desa diwilayah kerjanya
 - c) Melaksanakan kebijakan Kepala Desa
4. Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan berupa wawancara yang disebarkan oleh penulis yang berisikan informan dalam penelitian ini adalah keterwakilan delegasi Kepala Desa dan masyarakat di wilayah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan dibawah ini:

1. Umur Informan

Usia memberikan isyarat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa dengan baik. Usia muda akan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal di bandingkan yang usia lebih tua, terkadang terkendala dengan umur yang sudah lanjut. Hal lain juga dipengaruhi oleh ketahanan fisik. Informan yang masih tergolong usia muda yaitu kurang dari 45 tahun dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu memberikan pengaruhnya dalam bentuk peranan sebagai Stabilisator, Inovator dan Pelopor dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa. Sedangkan responden yang masih tergolong usia tua yaitu 45 tahun, akan mendapat kesulitan untuk melaksanakan tugasnya dan juga dalam proses pembangunan di Desa. Untuk lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Umur Informan Diperincikan berdasarkan usia termuda dan umur tertua.

No	Usia	Informan	Persentase	Responden	Persentase
1	26-30	1	16,7	4	21,1
2	31-35	1	16,7	5	26,3
3	36-40	1	16,7	3	15,7
4	41-45	3	49,9	2	5,3
5	46-50	-	-	3	5,3
6	50 keatas	-	-	10	26,3
Jumlah		6	100%	27	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Perawang Barat Tahun 2019

Dari tabel diatas tersebut terlihat bahwa responden diyakini mampu memenuhi tugasnya dengan baik serta mampu memberikan pengaruhnya dalam bentuk peranan sebagai stabilisator, inovator dan pelopor dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Perawang Barat. Hal ini terlihat banyaknya usia muda pada usia responden dibawah usia 45 tahun yang berjumlah 14 orang atau 68,4% dari keseluruhan jumlah responden. sedangkan yang berusia tua atau diatas 50 tahun berjumlah 13 orang atau 31,6% untuk informen yang terdiri dari aparat pemerintahan desa yang berjumlah 13 orang keseluruhannya berusia muda atau 100%.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan juga dapat memenuhi tingkat pengetahuan seseorang dan merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tingkat pengetahuan mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil penelitian pada kantor Kepala Desa Perawang Barat maka terlihat tingkat pendidikan dari informan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.2 Tingkat Pendidikan Informan Desa Perawang Barat

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	32,2
2	SMP	1	32,2
3	SMA	1	32,2
Jumlah		3	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Perawang Barat Tahun 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan informan bervariasi, yaitu 1 orang atau 32,2% tamatan SMA, 1 orang atau 32,2% tamatan SMP dan 1 orang atau 32,2% tamatan SD. Bervariasi akan tetapi mayoritas tingkat pendidikan informen adalah tamatan SD. Maka dalam hal ini sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dengan baik, karena pendidikan formal yang diperoleh seseorang menunjukkan pola pikir dalam menghadapi

masalah. Selain pendidikan yang dimiliki oleh seseorang pengalaman juga menentukan keputusan yang akan diambil dalam menjalankan roda pemerintah.

Sedangkan tingkat pendidikan Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 Tingkat pendidikan Informan dari aparat pemerintah desa dan RW di Desa Perawang Barat.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	11	70,1%
2	SMP	7	10,1%
3	SMA	5	9,1%
4	S.I	4	8,0%
	Jumlah	27	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Perawang Barat 2019

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menanggapi arti pentingnya pembangunan desa serta dapat mengetahui peranannya di dalam menjalankan roda pemerintahan demi kelancaran pembangunan. Selain itu faktor pengalaman juga turut mempengaruhi pola pikir masyarakat itu sendiri. Dari tabel di atas rata-rata tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini tamatan SD sejumlah 15 orang persentase sebesar 78,1%.

B. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan dalam hal ini ada dua cara yang dapat dimanfaatkan, pertama melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi dan guna dapat pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. kedua, setelah rancangan awal perencanaan pembangunan selesai disusun, aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Menurut Siagian (2012:142), menyebutkan bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan yaitu:

1. Sebagai Stabilisator

Peran pemerintah dalam pembangunan yang dipertegas oleh Siagian (2012:143-145) menyatakan bahwa peran pemerintah selaku Stabilisator terbagi kedalam beberapa bagian yaitu:

a. Stabilisator bidang politik

Peranan kepala desa sebagai stabilisator menjelaskan bahwa kepala desa harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul dimasyarakat desanya. Beberapa peran penting yang mestinya dilaksanakan oleh kepala desa secara efektif dan efisien sebagai stabilisator yaitu: menjaga stabilitas politik yang ada di desa yang dipimpin. Hal tersebut memberi maksud bahwa kepala desa harus mampu menjaga kestabilan politik yang ada di desa, karena kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang

kehidupan di desa tidak akan dapat berlansung dengan mantap tanpa adanya stabilitas politik.

b. Stabilisator bidang ekonomi

Peran sebagai stabilitas ekonomi yang dimaksud adalah menciptakan iklim atau kondisi yang memungkinkan perekonomian desa dalam terpilihara sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kepentingan desa. Peran pemerintah disini memberi maksud bahwa kepala desa harus mampu menjaga kestabilan ekonomi di desa yang dia pimpin.

c. Stabilisator bidang sosial budaya

Peran pemerintah di bidang sosial budaya terlihat bahwa menjadikan bangsa menjadi masyarakat yang maju dan modren, tanpa kehilangan jati dirinya. peran pemerintah desa selaku stabilisator dalam bidang sosial budaya adalah mampu mewujudkan perubahan dan tidak berubah menjadi gejolak sosial apalagi yang dapat mengancam keutuhan masyarakat di desa itu sendiri.

1. Stabilisator

Peranan pemerintah dalam pembangunan yang dipertegas oleh Siagian (2012:143-145) menyatakan bahwa peran pemerintah selaku Stabilisator terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

a. Stabilisator bidang politik

b. Stabilisator bidang ekonomi

c. Stabilisator bidang budaya

berikut ini adalah tanggapan informan mengenai stabilisator dalam melaksanakan pembangunan desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.

1. Dari penjelasan Tanggapan informan bahwa jumlah katagori jawaban masyarakat terhadap pertanyaan indikator penyusunan rencana pembangunan yaitu menjaga stabilitas politik yang ada di desa Sangat berperan dalam melaksanakan pembangunan desa dan ada beberapa masyarakat yang kurang berperan dalam melaksanakan pembangunan desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.
2. Selanjutnya tanggapan informan terhadap pertanyaan kondisi perekonomian masyarakat sangat berperan karena untuk pembangunan desa masyarakat dapat menguntungkan bagi kepentingan desa.
3. Selanjutnya tanggapan Informan terhadap pertanyaan menjaga dan mewujudkan pembangunan di desa yang menjawab sangat berperan. Karena pembangunan yang telah diwujudkan harus dapat dijaga dalam segi perubahan di desa perawang barat dan dapat menajadikan masyarakat yang maju dan modern, sehingga masyrakat mampu merubah gejala social apalagi dapat menguntungkan keutuhan masyrakat di desa perawang barat kecematan tulang kabupaten siak.

Dari tanggapan informan dapat disimpulkan bahwa tanggapan informan tentang indikator peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa perawang barat dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori cukup berperan dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 7orang.

Berdasarkan hasil (Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Faizal S.Hi., Tanggal 09 September 2019, Pukul 10.30 Wib). pembangunan di Desa Perawang Barat, bahwa dalam tahap penetapan rencana pembangunan sudah mulakukan (monotoring) seluruh kegiatan pembangunan dan usaha-usaha yang dilaksanakan pasca musrenbang, realisasi dari sebuah perencanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pasca musrenbang.

Berdasarkan hasil (Wawancara Dengan Ketua RT Bapak Supriadi., Tanggal 17 September 2019, Pukul 10.30 Wib). Pembangunan di desa perawang bara t sangat dibutuhkan teanag kerja yag andal antara masyarakat dan pemerintah desa agar tercapai suatu hasil yang maksimal dalam perencanaan pembangunan didesa perawang barat kabupaten siak, Selanjut nya.

Berdasarkan hasil (Wawancara Dengan Kaur Pembangunan Bapak Syahrial S.E., Tanggal 7 September 2019, Pukul 13:30 Wib). Tercapai suatu perecanaan pembangunan dapat kita lihat dari hasil pembangunan yang akan di rencanakan, sehingga dibutuhkan tunjangan seperti dana pemerintah agar dapat merencenakan suatu pembangunan di desa bagi masyarakat yang membutuhkan, selanjutnya

Berdasarkan hasil (**Wawancara Dengan Kepala Dusun Bapak Sayamsir., Tanggal 9 September 2019, Pukul 13:00 Wib**). pembangunan yang telah diwujudkan harus dapat dijaga dalam segi perubahan di desa perawang barat dan dapat menjadikan masyarakat yang maju dan modern, sehingga masyarakat mampu merubah gejala social apalagi dapat menguntungkan keutuhan masyarakat di desa perawang barat kecamatan tulang kabupaten siak.

Berdasarkan hasil (**Wawancara Dengan Ketua RW Bapak Zulfahmi., S.Ap. Tanggal 10 September 2019, Pukul 10:20 Wib**). Pertama melakukan penjarangan aspirasi masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi dan guna dapat pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. kedua, setelah rancangan awal perencanaan pembangunan selesai disusun, aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di perawang barat kabupaten siak.

Berdasarkan hasil (**Wawancara Dengan Ketua BPD Bapak Sudirman, Tanggal 28 Sepetember 2019, Pukul 08:30 Wib**). perencanaan pembangunan tersebut masih dapat diselesaikan, hambatan yang dijumpai misalnya berupa masih kurangnya tenaga kerja pemerintah desa dibandingkan dengan banyaknya masyarakat serta kurangnya kepedulian masyarakat mengenai persyaratan pembangunan desa perawang barat.

Berdasarkan hasil (**Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Rahmat Cahyono,ST. tanggal 02 November 2019, Pukul 10:00 Wib**). Peran perencanaan pembangunan sebagai stabilitas ekonomi dapat menciptakan iklim

atau kondisi yang memungkinkan perekonomian desa dalam terpelihara sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kepentingan desa. Peran pemerintah di bidang ekonomi terlihat bahwa menjadikan bangsa menjadi masyarakat yang maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat harus dapat bekerja sama dalam membangun suatu perencanaan pembangunan di desa perawang barat.

2. Sebagai Inovator

Peran pemerintah menurut Siagian (2012:145-146) inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas yang meski dilakukan oleh pemerintah selaku inovator yaitu:

1. Menerapkan inovasi dilingkungan birokrasi pemerintahan
2. inovasi yang sifatnya konseptual
3. inovasi, sistem, prosedur dan metode kerja

Berikut ini jawaban dan tanggapan informan mengenai inovator dalam melaksanakan pembangunan desa di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.

1. Dari tanggapan informan dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban masyarakat terhadap pertanyaan indikator peranan pembangunan desa yaitu menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan desa sangat berperan dalam pembangunan desa

sehingga pemerintahan desa dapat memberikan implementasi program bantuan dalam mewujudkan pembangua desa perawang barat.

2. Tanggapan informan terhadap pertanyaan adanya inovasi yang sifatnya konseptual yang berperan dalam memjudkan pembangunan desa sehingga desa dapat merencanakan suatu pembangunan yang memberi kn konsep untuk kelancaran pembangunan desa
3. Selanjutnya tanggapan informan terhadap system prosedur dan metode kerja. Beberapa masyarakat yang berperan dalam system kerja pemerintahan dan ada juga kurang beperannya masyrakat dalam mewujudkan pembangunan desa. Sehingga perlu memerlukan system prosedur dan metode kerja yang sesuai dengan masyarakat perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.

Dari tanggapan informan dapat disimpulkan bahwa tanggapan informan tentang indikator peranan pemerintah desa dalam pembangunan dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori cukup berperan dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 7 orang

Berdasarkan hasil (Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Faizal S.Hi., Tanggal 09 September 2019, Pukul 10.30 Wib). Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. bahwa dalam tahap peranan pemerintahan desa dalam pembangunan sudah mulai agak terencana dengan baik, beliau mengatakan setelah dokumen rencana pembangunan diterima orang atasan, kemudian dipilih dimana isu-isu penting diwilayah desa perawang desa, selanjutnya di musyawarahkan perencanaan pembangunan di desa perawang

barat untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan dengan mengundang dinas terkait dari kabupaten, UPTD yang ada dikecamatan dan beserta aparat desa perawang barat.

Berdasarkan hasil **Wawancara Dengan Ketua RT Bapak Supriadi., Tanggal 17 September 2019, Pukul 10.30 Wib).** pembangunan desa menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan desa sangat berperan dalam pembangunan desa sehingga pemerintahan desa dapat memberikan implementasi program bantuan dalam mewujudkan pembanguna desa perawang barat

Berdasarkan hasil **(Wawancara Dengan Kaur Pembangunan Bapak Syahrial S.E., Tanggal 7 September 2019, Pukul 13:30 Wib).** pertanyaan adanya inovasi yang sifatnya konseptual yang berperan dalam mewujudkan pembangunan desa sehingga desa dapat merencanakan suatu pembangunan yang memberi kn konsep untuk kelancaran pembangunan desa

Berdasarkan hasil **(Wawancara Dengan Kepala Dusun Bapak Sayamsir., Tanggal 9 September 2019, Pukul 13:00 Wib).** system prosedur dan metode kerja. Beberapa masyarakat yang berperan dalam system kerja pemerintahan dan ada juga kurang beperannya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa. Sehingga perlu memerlukan system prosedur dan metode kerja yang sesuai dengan masyarakat perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.

Berdasarkan hasil **(Wawancara Dengan Ketua RW Bapak Zulfahmi., S.Ap. Tanggal 10 September 2019, Pukul 10:20 Wib).** Inovasi masyarakat sesuai

dengan apa yang diberikan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang dapat direalisasikan dalam pembangunan Desa Perawang Barat.

Berdasarkan hasil (Wawancara Dengan Ketua BPD Bapak Sudirman, Tanggal 28 September 2019, Pukul 08:30 Wib). Dalam perencanaan pembangunan pemerintah terinovasi membangun suatu perencanaan dalam suatu pembangunan yang efektif dan tepat sasaran terutama dalam hal dana pembangunan di perawang barat.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Rahmat Cahyono, ST. tanggal 02 November 2019, Pukul 10:00 Wib. Dalam pembangunan ini, adanya inovasi di desa perawang barat ini yang masih banyaknya kekurangan dalam kepedulian pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa perawang.

3. Sebagai Pelopor

Pemerintah harus juga memainkan peran selaku pelopor disamping itu Siagian (2012:148) bahwa menyatakan selain peran sebagai inovator ada juga peran sebagai pelopor.

1. Kepeloporan dalam bekerja seproduktif
2. Kepeloporan dalam hal kejujuran
3. Kepeloporan dalam hal penegakan disiplin
4. Kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundang-undangan

5. Kepeloporan dalam kesediaan berkorban demi kepentingan bersama

6. Kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian lingkungan

1. Tanggapan informan yang dijelaskan bahwa jumlah kategori jawaban masyarakat terhadap pertanyaan indikator peranan pembangunan desa yaitu menerapkan kepeloporan dalam bekerja sproduktif dengan memanfaatkan hasil yang maksimal karna pemerintah desa memberikan waktu untuk membangun suatu rencana pembangunan terhadap desa perawang barat agar tercapai suatu pembangunan yang lebih baik kedepannya.
2. Tanggapan informan terhadap pertanyaan kepeloporan dalam kejujuran penegakan disiplin dan ketaatan yang kurang nya berperan kepada masyarakat, karna kurang nya kejujuran dalam menegakan kedisiplinan pada masyarakat untuk membangun desa perawang barat, sehingga beberapa pembangunan bisa menjadi terbengkalai akibat kurangnya kejujuran, kedisiplinan dan kepedulian masyarakat.
3. Selanjutnya tanggapan informan terhadap Kepeloporan kesediaan berkorban dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di desa yaitu banyak dan tidak nya masyarakat yang ikut berperan dalam membangun kelestarian desa agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya didesa perawang barat, kecamatan tualang kabupaten siak.

Dari tanggapan informan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator peranan pemerintah desa dalam pembangunan dari

tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori cukup berperan dan kurang berperan nya masyarakat dalam kepedulian dan kedisiplinan dalam membangun pembangunan desa perawang barat.

Berdasarkan dari hasil (Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Faizal S.Hi., Tanggal 09 September 2019, Pukul 10.30 Wib). Desa Perawang Barat Kecamatan tualang. beliau mengatakan bahwa dalam peranan pemerintahan desa dalam pembangunan desa tersebut sudah melakukan (monitoring) seluruh kegiatan pembangunan dan usaha-usaha yang dilaksanakan pasca musrenbang.

Agar pemerintahan desa dapat sesuai dengan rencana kerja dari menghasilkan kerja dengan baik, maka kepala desa perlu meningkatkan pengetahuan kepala desa dengan memberi kn supervisi bagi masyarakat dengan adanya kepedulian terhadap pembangunan, demikian juga keahlian skill pemerintahan desa tersebut.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Ketua RT Bapak Supriadi., Tanggal 17 September 2019, Pukul 10.30 Wib). kepeloporan dalam bekerja produktif dengan memanfaatkan hasil yang maksimal karna pemerintah desa memberikan waktu untuk membangun suatu rencana pembangunan terhadap desa perawang barat agar tercapai suatu pembangunan yang lebih baik kedepannya.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Kaur Pembangunan Bapak Syahrial S.E., Tanggal 7 September 2019, Pukul 13:30 Wib). kepeloporan dalam suatu hal kejujuran penegakan kedisiplinan dan ketaatan yang kurang nya berperan kepada masyarakat, karna kurang nya kejujuran dalam menegakan

kedisiplinan pada masyarakat untuk membangun desa perawang barat, sehingga beberapa pembangunan bisa menjadi terbengkalai.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Kepala Dusun Bapak Sayamsir., Tanggal 9 September 2019, Pukul 13:00 Wib. terhadap Kepeloporan kesediaan suatu kepedulian terhadap pelestarian lingkungan yang ada di desa, yaitu banyak dan tidak nya masyarakat yang ikut berperan dalam membangun kelestarian desa. Sehingga menjadi kurang baik dari pada sebelumnya. didesa perawang barat, kecamatan tualang kabupaten siak.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Ketua RW Bapak Zulfahmi., S.Ap. Tanggal 10 September 2019, Pukul 10:20 Wib. Masyarakat di desa perawang barat adanya suatu perencanaan pembangunan yang ingin terealisasikan untuk desa terhadap pembangunan apa yang di butuhkan masyarakat setempat. Sehingga adanya suatu kepeloporan terhadap pemerintah desa agar tercapainya pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Ketua BPD Bapak Sudirman, Tanggal 28 Sepetember 2019, Pukul 08:30 Wib. Yang dimana perencanaan pembangunan di pemerintah desa perawang barat ini ,masih banyaknya kepeloporan dalam hal bekerja ,baik dalam kejujuran sutu perencanaan pembangunan maupun kedisiplinan sehingga pemerintah desa sangat berupaya agar masyarakat dapat merencanakan suatu pembangunan dalam bekerja sama di desa perawang barat.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Rahmat Cahyono,ST. tanggal 02 November 2019, Pukul 10:00 Wib. Masyarakat hanya ingin pemerintah desa dapat ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa perawang barat ini agar pembangunan yang ingin di capai pemerintah desa dan masyarakat dapat terpenuhi.

4. Sebagai Modernisator

Melalui pembangunan setiap Negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, di perlukan sederajat oleh Negara-negara lain.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain :

11. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Kemampuan dan kemahiran manajerial.
13. Kemampuan mengelolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.
14. Sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif.
15. Landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis.
16. Memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan.
17. Rakyat yang dibedakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang “ nasibnya”.
18. Kesiediaan mengambil resiko.
19. Orientasi masa depan

20. Bersedia menerima perubahan.

Pengalaman banyak Negara menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peran penting itu, proses modernisasi harus terjadi dilingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

1. Dari tanggapan informan dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban masyarakat terhadap pertanyaan indikator peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa yang menerapkan modernisator dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang menjawab sangat berperan karena adanya teknologi sangat membantu bagi masyarakat untuk tercapainya pembangunan.
2. Tanggapan informan terhadap pertanyaan Modernisator system pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif yang berperan dalam perilaku kehidupan masyarakat agar kebutuhan – kebutuhan kosumsi dalam pembangunan desa dapat dikerjakan dengan adanya sumber daya manusia yang produktif dan efisien.
3. Selanjutnya tanggapan informan terhadap Modernisator sebagai landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis dalam pembangunan di desa cukup berperan karna adanya landasan ini masyarakat akan menjadi kukuh dalam berkerja untuk membangun demokratis yang efektif. .

Dari tanggapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan informan tentang indikator peranan pemerintah desa dalam pembangunan dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori cukup berperan dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 7 orang

Berdasarkan hasil (Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Faizal S.Hi., Tanggal 09 September 2019, Pukul 10.30 Wib). peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa yang menerapkan modernisator dalam penguasaan ilmu pengatahwaan dan teknologi dalam pembangunan yang menjawab sangat berperan karena adanya tecknologi sangat membantu bagi masyarakat untuk tercapainya pembangunan di desa perawang barat.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Ketua RT Bapak Supriadi., Tanggal 17 September 2019, Pukul 10.30 Wib). Modernisator system pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif yang berperan dalam perilaku kehidupan masyarakat agar kebutuhan – kebutuhan kosumsi dalam pembangunan desa dapat dikerjakan dengan adanya sumber daya manusia yang produktif dan efensien.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Kaur Pembangunan Bapak Syahrial S.E., Tanggal 7 September 2019, Pukul 13:30 Wib). landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis dalam pembangunan di desa cukup berperan karrna adanya landasan ini masyrakat akan menjadi kukuh dalam berkerja untuk membangun demokratis yang efektif. .

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Kepala Dusun Bapak Sayamsir., Tanggal 9 September 2019, Pukul 13:00 Wib. Masyarakat dan pemerintah desa harus Memiliki visi dan misi yang dapat tersampaikan dalam perencanaan pembangunan yang dimana modernisator dalam masyarakat mampu dan dapat mengambil keputusan yang rasional .

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Ketua RW Bapak Zulfahmi., S.Ap. Tanggal 10 September 2019, Pukul 10:20 Wib. Yang mana perencanaan desa bisa memiliki pandang modernisator terhadap pembangunan sehingga pembangunan yang produktif dapat di pandang dalam perencanaan di perawang barat.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Ketua BPD Bapak Sudirman, Tanggal 28 Sepetember 2019, Pukul 08:30 Wib. Modernisator dalam perencanaan dalam pemabngunan sangat bagus, karena sangat pengaruh terhadap perkembngan pembangunan modern di desa perawang barat.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Rahmat Cahyono,ST. tanggal 02 November 2019, Pukul 10:00 Wib. Masyarakat dan pemerintah desa harus berfikir dengan baik agar tercapainya pembangunan modernisator yang sedarajat dalam perkembangan kedepannya untuk perawang barat.

5. Selaku Pelaksana Sendiri

Kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan Negara, modal yang terbatas kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan arena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Maka dari itu, pemerintah masih di tuntut untuk memainkan peran selaku pelaksanaan sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Sedangkan menurut Soekanto (2001;269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- d. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- e. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- f. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat;

Menurut Soekanto (2002;243) pengertian peranan adalah sebagai berikut peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan

Peranan juga bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan

masyarakat dengan cara menyediakan atau memberikan fasilitas yang dipergunakan masyarakat untuk mengatasi masalah.

Menurut pengertian peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tak dapat di pisah – pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lainya dan sebaliknya.

1. Dari tanggapan informan dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban masyarakat terhadap pertanyaan indikator peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa dimana Selaku Pelaksana Sendiri merupakan Peranan yang meliputi norma-norma dan dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat cukup berperan karna banyaknya masyarakat yang ingin posisi atau tempat yang ingin di bangun suatu pembangunan layaknya rumah bantuan pemerintah.
2. Tanggapan informan terhadap Selaku Pelaksana Sendiri sebagai konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dalam pembangunan didesa cukup berperan karena untuk membangun suatu pembangunan yang utuh harus memiliki orginasasi yang lebih baik agar tercapai nya suatu pembangunan yang kokoh, kuat dan kepastian.
3. Selanjutnya tanggapan Informan terhadap Selaku Pelaksana Sendiri sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosia masyarakat karna adanya struktur social ini masyarakat akan disiplin dan tertib

dalam melakukan tugas dalam membangun suatu pembangun desa perawang barat.

Dari tanggapan informan dapat disimpulkan bahwa tanggapan informan tentang indikator peranan pemerintah desa dalam pembangunan dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori cukup berperan dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 36 orang

Berdasarkan tanggapan-tanggapan informan dapat di uraian mengenai peranan pemerintahan desa dalam pembangunan yang dilakukan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di desa perawang barat.

A. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Berdasarkan penilaian informan juga menyatakan bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak dalam katagori cukup baik, hal ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat perawang barat dapat bekerja sama dengan pemerintahan dalam pembangunan yang ingin dicapai agar desa perawang barat dapat memiliki rasa kepedulian, kedisiplinan dan kerja sama dalam peranan pembangunan desa. dari 7 orang yang dijadikan informan penelitian ini, dapat di katakan peranan pemerintah dengan masyarakat cukup baik .

B. Hambatan Tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

beberapa hal yang menjadi faktor penghambat peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak diantaranya sebagai berikut:

1. Hambatan pada peran sebagai stabilisator

Beberapa hal yang menghambat aparat pemerintah desa dalam peran sebagai stabilisator yaitu: kurang mampu aparat pemerintah desa dalam menjaga kestabilitas politik yang terjadi di Desa Perawang Barat, pola pikir masyarakat yang tergolong masih rendah serta kurangnya kejelasan pemerintah dalam proses pembangunan.

Hasil (*Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Faizal S.Hi., Tanggal 09 September 2019, Pukul 10.30 Wib*). pembangunan di Desa Perawang Barat, bahwa dalam tahap penetapan rencana pembangunan sudah melakukan (monotoring) seluruh kegiatan pembangunan dan usaha-usaha yang dilaksanakan pasca musrenbang, realisasi dari sebuah perencanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pasca musrenbang.

Hasil (*Wawancara Dengan Kaur Pembangunan Bapak Syahrial S.E., Tanggal 7 September 2019, Pukul 13:30 Wib*). Tercapai suatu perencanaan pembangunan dapat kita lihat dari hasil pembangunan yang akan di rencanakan, sehingga dibutuhkan tunjangan seperti dana pemerintah agar dapat merencanakan suatu pembangunan di desa bagi masyarakat yang membutuhkan

Hasil (*Wawancara Dengan Ketua RT Bapak Supriadi., Tanggal 17 September 2019, Pukul 10.30 Wib*). Pembangunan di desa perawang barat sangat dibutuhkan tenaga kerja yang andal antara masyarakat dan pemerintah desa agar tercapai suatu hasil yang maksimal dalam perencanaan pembangunan di desa perawang barat kabupaten siak

Hasil (*Wawancara Dengan Kepala Dusun Bapak Sayamsir., Tanggal 9 September 2019, Pukul 13:00 Wib*). pembangunan yang telah diwujudkan harus dapat dijaga dalam segi perubahan di desa perawang barat dan dapat menjadikan masyarakat yang maju dan modern, sehingga masyarakat mampu merubah gejala sosial apalagi dapat menguntungkan keutuhan masyarakat di desa perawang barat kecamatan tulang kabupaten siak.

Hasil (*Wawancara Dengan Ketua RW Bapak Zulfahmi., S.Ap. Tanggal 10 September 2019, Pukul 10:20 Wib*). Pertama melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dalam bentuk pertemuan, diskusi dan guna dapat pandangan masyarakat tentang visi dan misi pembangunan yang diinginkan. kedua, setelah rancangan awal perencanaan pembangunan selesai disusun, aspirasi masyarakat dapat pula diserap melalui pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di perawang barat kabupaten siak.

Hasil (*Wawancara Dengan Ketua BPD Bapak Sudirman, Tanggal 28 September 2019, Pukul 08:30 Wib*). perencanaan pembangunan tersebut masih dapat diselesaikan, hambatan yang dijumpai misalnya berupa masih kurangnya tenaga kerja pemerintah desa dibandingkan dengan banyaknya masyarakat serta

kurangnya kepedulian masyarakat mengenai persyaratan pembangunan desa perawang barat.

Hasil (*Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Rahmat Cahyono, ST. tanggal 02 November 2019, Pukul 10:00 Wib*). Peran perencanaan pembangunan sebagai stabilitas ekonomi dapat menciptakan iklim atau kondisi yang memungkinkan perekonomian desa dalam terpelihara sedemikian rupa sehingga menguntungkan bagi kepentingan desa. Peran pemerintah di bidang ekonomi terlihat bahwa menjadikan bangsa menjadi masyarakat yang maju dan modren, tanpa kehilangan jati dirinya. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat harus dapat bekerja sama dalam membangun suatu perencanaan pembangunan di desa perawang barat.

2. Hambatan pada peran sebagai inovator

Beberapa hal yang menghambat aparat pemerintah desa dalam peran sebagai inovator adalah tingkat: pendidikan dari aparat pemerintah desa yang juga tergolong rendah sehingga tidak banyak melakukan perubahan dan terkadang perubahan yang dilakukan masih tidak dapat dan memberikan gejolak dimasyarakat.

Hasil (*Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Faizal S.Hi., Tanggal 09 September 2019, Pukul 10.30 Wib*). Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. bahwa dalam tahap peranan pemerintahan desa dalam pembangunan sudah mulai agak terencana dengan baik, beliau mengatakan setelah dokumen rencana pembangunan diterima orang atasan, kemudian dipilih

dimana isu-isu penting diwilayah desa perawang desa, selanjutnya di musyawarahkan perencanaan pembangunan di desa perawang barat untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan dengan mengundang dinas terkait dari kabupaten, UPTD yang ada dikecamatan dan beserta aparat desa perawang barat.

Hasil *Wawancara Dengan Ketua RT Bapak Supriadi., Tanggal 17 September 2019, Pukul 10.30 Wib).* pembangunan desa menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan desa sangat berperan dalam pembangunan desa sehingga pemerintahan desa dapat memberikan implementasi program bantuan dalam mewujudkan pembanguna desa perawang barat

Hasil *(Wawancara Dengan Kaur Pembangunan Bapak Syahrial S.E., Tanggal 7 September 2019, Pukul 13:30 Wib).* pertanyaan adanya inovasi yang sifatnya konseptual yang berperan dalam mewujudkan pembangunan desa sehingga desa dapat merencanakan suatu pembangunan yang memberi kn konsep untuk kelancaran pembangunan desa

Hasil *(Wawancara Dengan Kepala Dusun Bapak Sayamsir., Tanggal 9 September 2019, Pukul 13:00 Wib).* system prosedur dan metode kerja. Beberapa masyarakat yang berperan dalam system kerja pemerintahan dan ada juga kurang berperannya masyrakat dalam mewujudkan pembangunan desa. Sehingga perlu memerlukan system prosedur dan metode kerja yang sesuai dengan masyarakat perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.

Hasil (*Wawancara Dengan Ketua RW Bapak Zulfahmi., S.Ap. Tanggal 10 September 2019, Pukul 10:20 Wib*). Inovasi masyarakat sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang dapat direalisasikan dalam pembangunan Desa Perawang Barat.

Hasil (*Wawancara Dengan Ketua BPD Bapak Sudirman, Tanggal 28 September 2019, Pukul 08:30 Wib*). Dalam perencanaan pembangunan pemerintah terinovasi membangun suatu perencanaan dalam suatu pembangunan yang efektif dan tepat sasaran terutama dalam hal dana pembangunan di perawang barat.

Hasil *Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Rahmat Cahyono, ST. tanggal 02 November 2019, Pukul 10:00 Wib*. Dalam pembangunan ini, adanya inovasi di desa perawang barat ini yang masih banyaknya kekurangan dalam kepedulian pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa perawang.

3. Hambatan pada peran sebagai pelopor

Beberapa hal yang dapat menjadi hambatan aparat pemerintah desa dalam peran sebagai pelopor adalah aparat pemerintah desa belum bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa yang selama ini terjadi.

Hasil (*Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Faizal S.Hi., Tanggal 09 September 2019, Pukul 10.30 Wib*). Desa Perawang Barat Kecamatan tualang. beliau mengatakan bahwa dalam peranan pemerintahan desa dalam

pembangunan desa tersebut sudah melakukan (monitoring) seluruh kegiatan pembangunan dan usaha-usaha yang dilaksanakan pasca musrenbang.

Agar pemerintahan desa dapat sesuai dengan rencana kerja dari menghasilkan kerja dengan baik, maka kepala desa perlu meningkatkan pengetahuan kepala desa dengan memberi kn supervisi bagi masyarakat dengan adanya kepedulian terhadap pembangunan, demikian juga keahlian skill pemerintahan desa tersebut.

Hasil *Wawancara Dengan Ketua RT Bapak Supriadi., Tanggal 17 September 2019, Pukul 10.30 Wib).* kepeloporan dalam bekerja produktif dengan memanfaatkan hasil yang maksimal karna pemerintah desa memberikan waktu untuk membangun suatu rencana pembangunan terhadap desa perawang barat agar tercapai suatu pembangunan yang lebih baik kedepannya.

Hasil *Wawancara Dengan Kaur Pembangunan Bapak Syahrial S.E., Tanggal 7 September 2019, Pukul 13:30 Wib).* kepeloporan dalam suatu hal kejujuran penegakan kedisiplinan dan ketaatan yang kurang nya berperan kepada masyarakat, karna kurang nya kejujuran dalam menegakan kedisiplinan pada masyarakat untuk membangun desa perawang barat, sehingga beberapa pembangunan bisa menjadi terbengkalai.

Hasil *Wawancara Dengan Kepala Dusun Bapak Sayamsir., Tanggal 9 September 2019, Pukul 13:00 Wib.* terhadap Kepeloporan kesediaan suatu kepedulian terhadap pelestarian lingkungan yang ada di desa,yaitu banyak dan tidak nya masyarakat yang ikut berperan dalam membangun kelestarian desa.

Sehingga menjadi kurang baik dari pada sebelumnya. didesa perawang barat, kecamatan tualang kabupaten siak.

Hasil *Wawancara Dengan Ketua RW Bapak Zulfahmi., S.Ap. Tanggal 10 September 2019, Pukul 10:20 Wib.* Masyarakat di desa perawang barat adanya suatu perencanaan pembangunan yang ingin terealisasikan untuk desa terhadap pembangunan apa yang di butuhkan masyarakat setempat. Sehingga adanya suatu kepeloporan terhadap pemerintah desa agar tercapainya pembangunan tersebut.

Hasil *Wawancara Dengan Ketua BPD Bapak Sudirman, Tanggal 28 Sepetember 2019, Pukul 08:30 Wib.* Yang dimana perencanaan pembangunan di pemerintah desa perawang barat ini ,masih banyaknya kepeloporan dalam hal bekerja ,baik dalam kejujuran sutu perencanaan pembangunan maupun kedisiplinan sehingga pemerintah desa sangat berupaya agar masyarakat dapat merencanakan suatu pembangunan dalam bekerja sama di desa perawang barat.

Hasil *Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Bapak Rahmat Cahyono,ST. tanggal 02 November 2019, Pukul 10:00 Wib.* Masyarakat hanya ingin pemerintah desa dapatikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa perawang barat ini agar pembangunan yang ingin di capai pemerintah desa dan masyarakat dapat terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak. faktor sumber daya manusia, faktor ini merupakan faktor yang paling utama yang menghambat Peranan peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa

perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak rata-rata tamatan sekolah dasar (SD) sehingga mempengaruhi pola pikir dari aparat pemerintah desa sehingga pemerintah desa banyak menemukan kesulitan untuk menjalankan pembangunan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai penelitian Peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi pemerintahan Desa Perawang di Kecamatan Tualang sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- a. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak, bahwa mulai tahap penyusunan rencana sampai dengan evaluasi keberhasilan rencana pembangunan yang mendapat tanggapan dari masyarakat tentang pembangunan yang ada di desa dari hasil wawancara tanggapan informan menjawab. phal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ajakan dari pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan rencana pembangunan ditambah lagi jaranganya dilakukan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk dapat memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dan juga mendapat masukan untuk melakukan perbaikan penyusunan perencanaan dimasa mendatang.
- b. Setelah analisis diketahui yang menjadi penghambat dari pelaksana kewenangan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini adalah disebabkan

oleh kegagalan pemerintah Desa dalam mengelola kegiatan pembangunan diwilayah Desa Perawang Barat. Kegagalan tersebut kurang penyusunan rencana pembangunan dan partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan serta pemberdayaan dikalangan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Desa.

B. Saran

Adapun saran penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahap Penyusunan Rencana Pembangunan penulis menyarankan agar pemerintah Desa dalam hal ini Desa benar-benar menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dalam menyusun rancangan rencana pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum.
2. Dalam Penetapan Rencana Pembangunan juga masih perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa penulis menyarankan dalam penetapan prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dikalangan masyarakat. Prioritas dapat ditentukan menurut bidang dan sektor pembangunan dalam rangka efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Tahap Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan penulis menyarankan bahwa Pemerintah Desa tidak hanya menyusun dan menetapkan rencana pembangunan saja tetapi masih tetap mempunyai

tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring), hal ini sangat penting untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.

4. Yang terakhir Pemerintah Desa masih mempunyai tanggung jawab yaitu melakukan Evaluasi keberhasilan Pelaksana Rencana Pembangunan untuk itu saran penulis adalah setelah pembangunan selesai dikerjakan, pemerintah Desa perlu melakukan Evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. sasaran utamanya adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dikerjakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai masukan atau umpan balik untuk menyusun perencanaan pembangunan dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Awang, azam 2010 *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu 2000. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Edisi Revisi. Jakarta
- Kaho, Josep Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kartono, Kartini. 2009. *Pemimpin Dan Kemimpinan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Miftah, Thoha 1995. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Miles, M. B dan A M. Humberman. 1992 *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah. Tjetjep Rohidi, Jakarta: UI Pres
- Nurcholis 2001 *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* . Jakarta
- Nawawi, Hadari 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Kybernology Jilid 1* . Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology Jilid 2* . Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2008. *Kybernologi dan Pembangunan*. Tangerang : Sirao Credentia Center
- Rasyid , Ryaas 2002. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan BPFE*, Yogyakarta
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sedarmayanti, Dra.,M.Pd. *Good Governace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, 2003, Bandung : CV Mandar Maju.
- Setyawan, Dharma. 2004. *Manejemen pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT. rajawali.
- Siagian, Sondang P., *Filsafat Adminitrasi*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1990.

- Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan*, Jakarta 2018
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian kuantitatif*. bandung: metodologi penelitian kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta.
- Suryaningrat, Bayu 1990, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta, Aksara Baru
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rafika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Utami, Eko Tri. 2007. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Medan : USU
- Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Palembang : Raja Grafindo Persada
- Wirjatmi. 2006. *Kualitas Pelayanan Publik*, STIA LAN Press. Jakarta.

B. Jurnal

- Apreliani, sherlygresita., *Peranan Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, Banyuwangi: 2009.
- Rafiko., *Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan Desa*, Pekanbaru: UIR, 2015.
- Tindi, Steffy Adelia., *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa*, pineleng: 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

UUD 1945 (pasal 18 ayat 2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau